BY ND NC

43952

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ABDURRAKHIM

NIM. 016593718

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM ini berjudul : **Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar**, adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber kutipan mapun rujukan telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Makassar, 20 Januari 2016

Yang menyatakan,

Abdurrakhim

NIM 016593718

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952 43952

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Meningkatkan Mutu PendidikanDi Kabupaten Kepulauan Selayar

ABDURRAKHIM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar. Manfaat penelitian:(1).Manfaat akademis(2).Manfaat praktis.Empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar adalah : (1) Komunikasi. (2) SumberDaya (3) Disposisi (4) Struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan apriori yang didasarkan padaa sumsi filosofis (pendekatan naturalistis interpretatif) .Lokasi penelitian adalah kabupaten Kepulauan Selayar, Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah wawancara, pengamatan dan dokumen melalui informan kunci. Teknik analisis data adalah reduksi data ,penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.Cara pengolahan secara manual danuntuk keabsahannya Kesimpulan penelitian : Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupatenKepulauan Selayar adalah : (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) Struktur Birokrasi.Faktor yang paling berpengaruh adalah komunikasi.Saran-saran : (1) perlu kejelasan dan konsisten informasi(2) anggaran perlu ditambah(3) perlaku staf perlu diperbaiki (4).perlaku birokrasi perlu diperbaiki

Kata Kunci :Implementasi,Kebijakan , danPendidikan Gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Policy ImplementationFree Education in Improving the Quality of Education In Selayar Islands Regency

ABDURRAKHIM

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the factors that affect the implementation of free education policy in the district Selayar Islands. The benefits of research: (1) The academic benefits of the berry (2) The practical benefits of the berry. Four factors influence the implementation of free education policy in the district Selayar are: (1) Communication. (2) Resources (3) Disposition (4) The bureaucratic structure. The method used is a qualitative method approach which is based padaa consumed priori philosophical (naturalistic interpretative approach) .The location is the district Selayar research, data source is primary data and secondary data. Methods of collecting is interview, observation and document through key informants. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion / verifikasi.Cara manually processing danuntuk validity CONCLUSIONS: Factors that influence the implementation of free education policy in kabupatenKepulauan Selayar are: (1) communication (2) resources (3) disposition (4) Structure of Bureaucracy. The most influential factor is communication. Suggestions: (1) need clarity and consistent information (2) budget needs to be increased (3) the behavior of the staff need to be fixed (4) .perilaku bureaucracy needs to be repaired

***Keywords:** Implementation, Policy, and Free Education*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**
Penyusun TAPM	:	ABDURAKHIM
NIM	:	016593718
Program Studi	:	S2 MAPU
Hari/Tanggal	:	Minggu/ 19 Februari 2017

Menyetujui

Pembimbing I,

Prof. Dr. Armin, M.Si
NIP. 196511091991031008

Pembimbing II

Prof. Dr. IGAK Wardani, M. Sc. Ed.
NIP.194012311961082001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S
NIP. 194401191977071001

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Administrasi Publik

Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana

Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

Nama : ABDURRAKHIM
NIM : 016593718
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia penguji TAPM program pascasarjana, program studi administrasi publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu/ 19 Februari 2017
Waktu : 10.00 s/d 11.45 wib
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Dra. Andi Sylvana, M.Si .....

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S .....

Pembimbing I :
Prof. Dr. Armin, M.Si .....

Pembimbing II :
Prof. Dr. IGAK Wardani, M. Sc. Ed. .....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). TAPM ini berjudul : " Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar". Suatu penelitian yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka (UPBJJ-UT Makassar).

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan TAPM ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang langsung maupun yang tidak langsung memberi dukungan bantuan moril, kesempatan dan informasi yang membuat TAPM ini dapat diselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Dr. Suciati. M. Sc. Selaku Direktur Program Pascasarjana.
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. Selaku pembimbing I dan Prof. Dr. IGAK wardani, M. Sc. Ed selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi TAPM.
4. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.
5. Andi Sylvana, SE., M.Si. Selaku ketua UPBJJ-UT Makassar
6. Bapak/ibu tutor Program studi Administrasi Publik Universitas Terbuka yang
7. Teman-teman kuliah Pascasrjana Program Studi Administrasi Publik angkatan 2011 yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan dukungan selama mengikuti pendidikan.
8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan TAPM ini yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Akhirnya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

semoga Allah SWT dapat memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kepada Penulis.

Selayar, Januari 2016

Abdurakhim
NIM 016593718

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

Nama	:	**ABDURRAKHIM**
N I M	:	**016593718**
Tempat dan Tanggal Lahir	:	SELAYAR, 06/12/1965
Registrasi Pertama	:	2012.1
Alamat Tetap	:	BUHUNG.DESA KAYU BAU KEC.BONTOMATENA KAB. KEP. SELAYAR Kodepos 92812
Telp/HP	:	085341664333

MAKASSAR, Januari 2016

ABDURRAKHIM
NIM. **016593718**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitan.....8
D. Kegunaan Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A.Kajian Teori.....10
B.Penelitian Terdahulu 35
C.Kerangka Berpikir 40
D.Defenisi Operasional 41

BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Desain Penelitian..... .43
B. Lokasi Penelitian.....44
C. Instrumen Penelitian.....44
D. Informan Kunci.....51
E. Prosedur Pengumpulan Data.....53
F. Metode Analisis Data.....53

BAB IV TEMUAN DAN BAHASAN 55
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar 55
1.Letak Geografis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.....55
2.Tugas pokok, fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.....55
3.Visi dan Misi Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.....61
4.Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.....61
5.Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis Dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar...63
B.Pembahasan..... 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 147
A. Kesimpulan.....147
B. Saran.....148

Daftar Pustaka.....150

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dibahas empat aspek : Pertama, latar belakang. Kedua, Perumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian.Keempat, Kegunaan penelitian

Ke empat aspek tersebut akan dibahas di bawah ini.

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi dan dilandasi keimanan dan ketakwaan.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menekankn bahwa pengambilan kebijakan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintahan daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan Kabupaten. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga implementasinya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini, tentu saja yang paling menentukan adaah Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Oleh karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu/kualitas pendidikan di daerahnya, meskipun tidak selamanya demikian, karena dalam pelaksanaannya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan bahkan penurunan kualitas.

Dari berbagai studi yang dilakukan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (*output*) terlalu memusatkan pada

masukan (*input*) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik.Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat.Di samping itu, segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas.Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi. Ketiga, partisipasi masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal partisipasi mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan. Ada dua hal khusus yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pertamamenetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan turunan dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU no. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga negara, dan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis awalnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2008 dan pada tahun 2009 penyelenggaraan pendidikan gratis ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011 penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar telah diatur dalam Perda no. 3 tahun 2011.Dengan adanya program pendidikan gratis ini peserta didik dibebaskan dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung. Pungutan yang dimaksud adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari peserta didik atau orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah, seperti permintaan bantuan pembangunan, permintaan bantuan dengan alasan dana sharing, pembayaran buku, pembayaran iuran pramuka, pembayaran LKS, pembayaran uang perpisahan, pembayaran uang photo, pembayaran uang ujian, pembayaran uang ulangan/semester, pembayaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

uang pengayaan/les, pembayaran uang rapor, pembayaran uang penulisan ijazah. pembayaran uang infaq, serta pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.

Ada tiga gambaran data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai berikut :1).jumlah satuan dan jenjang pendidikan dalam lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten Kepulauan selayar.2).Jumlah anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar terkait implementasi kebijakan pendidikan gartis.3).jumlah jumlah pendidik ,tenaga kependidikan dan peserta didik pada setiap satuan dan jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik negeri maupun swasta yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),kontrak,maupun honorer

1).Jumlah satuan dan jenjang pendidikan dalam lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten Kepulauan selayar

Adapun gambaran jumlah satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013 dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai berikut :1).sekolah yang berstatus negeri sebagai berikut : SD sebanyak 139 buah, MI sebanyak 5 buah, SMP sebanyak 48 buah, SMPT sebanyak 1 buah,SMU sebanyak 7 buah, MA sebanyak 1 buah dan SMK sebanyak 6 buah.2).sekolah yang bersatus swasta sebagai berikut : SD tidak ada,MI sebanyak 9 buah,SMP sebanyak 3 buah ,MTs sebanyak 11 buah,SMU sebanyak 2 buah,dan SMK sebanyak 1 buah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

2).Jumlah anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar terkait implementasi kebijakan pendidikan gartis

Gambaran anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis berjumlah sebesar Rp .... dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3). SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00 (data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

3).jumlah jumlah pendidik ,tenaga kependidikan dan peserta didik pada setiap satuan dan jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik negeri maupun swasta yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),kontrak,maupun honorer

Gambaran jumlah pendidik ,tenaga kependidikan dan peserta didik pada setiap satuan dan jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik negeri maupun swasta yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),kontrak,maupun honorer terdapat pada tabel 1.1.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 1.1 Jumlah pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik di Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap satuan dan jenjang pendidikan tahun 2013

No.	Satuan dan Jenjang Pendidikan	Pendidik	Tenaga Kependidikan	Peserta Didik
1.	SD	1.898	417	16.964
2.	MI	41	15	481
3.	SMP	1.020	375	7.652
4.	MTs	221	77	1.289
5.	SMPT	17	7	40
6.	SMU	189	63	2.611
7.	SMK	142	49	1.587
8.	MA	33	7	242
	Jumlah	3.561	1.010	30.866

(data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013.

Tujuan pendidikan gratis adalah meningkatkan kreatifitas siswa,.. Kreativitas siswa yang dimaksud disini adalah kegiatan siswa dalam sebuah organisasi baik intra maupun ekstrakulikuler, seperti : OSIS, PMR, Paskibraka, Olahraga, Remaja Masjid, dan lain-lain. Kegiatan siswa yang tentunya dalam setiap aktivitasnya berkembang sesuai bakat minat dan kompetensinya. Dalam Implementasi Perda Perda no,3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab IV larangan pasal 9 disebutkan bahwa kepala dan / atau guru dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun dan sekecil apapun yang berkaitan dengan kegiatan sekolah,.sementara dalam pemanfaatan anggaran pendidikan gartis, tidak semua kegiatan siswa dapat dibiayai oleh anggaran pendidikan gratis.khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas siswa.

Merujuk dari landasan yuridis impelementasi kebijakan pendidikan sebagai tersebut di atas,maka dapat dikatakan bahwa dengan implementasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan pendidikan gratis kreativitas siswa jadi terbatas,Fakta ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatkan mutu pendidikan.Kreativitas siswa di sekolah tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun dan sekecil apapun.

Berdasarkan dari pemasalahan tersebut di atas,tentu ada dimensi kebijakan public yang mempengaruhinya.Untuk mengetahui dimensi kebijakan publik yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis ,maka peneliti berupaya memilih Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lokasi penelitian,karena .Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tekhnis yang berkaitan dengan peningkatam mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar danpendidikan Gratis merupakan program unggulan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar

Landasan teori yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah pendapat Edward III (dalam Nawawi,2007).mengatakan bahwa dimensi kebijakan public yang dapat mempengaruhi impelementasi kebijakan public meliputi : (1).komunikasi.(2).sumber daya.(3).disposisi.(4).struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: " Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.di Kabupaten Kepulauan Selayar "

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka masalah pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan. diKabupaten Kepulauan Selayar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah untuk :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kabupaten Kepulauan Selayar agar daerah tersebut kedepannya lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan perbendaharaan studi ilmiah untuk program bidang ilmu administrasi publik dan khususnya untuk program studi administasi kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dibahas tiga aspek : Pertama, Kajian teori. Kedua, penelitian terdahulu. Ketiga, kerangka piker, ke Empat Defenisi Operasional

Ketiga aspek tersebut di atas akan dibahas di bawah ini :

I. Kajian Teori

A..Implementasi Kebijakan Publik

Berbicara tentang konsep implementasi senantiasa selalu dikaitkan dengan istilah kebijakan.Artinya setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi kebijakan publik sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat karena implementasi inilah yang menentukan "*siapa memperoleh apa*" dalam masyarakat. Proses serta perumusan kebijakan tidak berakhir, apabila suuatu kebijakan telah ditetapkan karena baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-hasil yang diperoeh dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut Fadillah (2001: 12), implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Dunn (2000:23) mengemukakan bahwa dalam pembuatan kebijakan, agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi.kebijakan berupa penyusunan serta tahapan yang jelas dan transparan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu tahap atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terus terjadi sepanjang waktu, dimana setiap tahap berhubungan dengan berikutnya dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda).

Abdullah (1987:11) menyatakan bahwa dalam proses implementasi, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu;

a. Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan
b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut
c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

proses implementasi tersebut..

B.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari obyek yang diteliti.Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dengan perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih mengarahkan kepada peneliti agar lebih fokus terhadap variable- variabel yang dikaji melalui penelitian ini, sehingga membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini.

Edward III (dalam Nawawi, 2007) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan publik menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersbut serta konsistensi informasi yang disampaikan.

1) Transmisi,

Transmisi yaitu penyaluran komunikasi. Transmisi yang optimal akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.Begitu juga sebaliknya,transmisi yang kurang optimal akan menghasilkan suatu hasil implementasi yang terdistorsi di tengah jalan.

2) Kejelasan informasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kejelasan informasi yaitu petunjuk pelaksanaan dari sebuahkebijakan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan.Kejelasan informasi dapat mempengaruhi pelaksanaan impelementasi kebijakan.Jika informasinya jelas,maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan berjalan optimal.Begitu juga sebaliknya,jika informasinya kurang jelas,maka pelaksanaan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

3).Konsistensi informasi

Konsistensi informasiyaitu perintah pelaksanaan tetap,tidak berubah-ubah.Jika perintah pelaksanaan tetap,tidak berubah-ubah akan memudahkan pelaksana kebijakan mencapai sasaran dan tujuan implementasi kebijakan.Begitu juga sebaliknya,jika perintah pelaksanaan berubah-ubah , maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya (*resources*)

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, jika para pelaksana memiliki sumber daya yang diperlukan ,tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan- maka implementasi ini pun cenderung tidak akan efektif. Sumber daya yang penting meliputi:

1) Staf (*staff*)

Staf adalah pelaksana implementasi kebijakan public.Implementasi akan berjalan optimal jika didukung jumlah staf yang cukup,kompetensi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

skill yang memadai.Begitu juga sebaliknya,Implementasi akan berjalan optimal jika kekurangan staf,kompetensi dan skill yang kurang memadai

2).Anggaran

Anggaran merupakan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan public.Anggaran merupakan sumber daya yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik.Implementasi kebijakan public akan berjalan optimal dan mencapai hasil yang diinginkan.jika didukung oleh anggaran yang cukup.Begitu juga sebaliknya,implementasi kebijakan public kurang berjalan optimal dan mencapai hasil yang mengecewakan jika tidak didukung anggaran tidak cukup.

2) Fasilitas (*facilities*)

Fasilitas adalah alat digunakan dalam implementasi kebijakan public. Pelaksana kebijakan public mungkin mempunyai staf yang memadai,dan mungkin mempunyai anggaranyang cukup untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa fasilitasbesar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

c. Disposisi (*attitudes*)

Disposisi adalah sikap para pelaksana. Para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan,jika kebijakan sesuai yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya, para pelaksana bersikap kurang atau tidak baik jika kebijakan tidak sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.Unsur-unsur yang terkait dengan disposisi

1).Penempatan Pegawai (*staffing the bureaucracy*),

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Penempatan pegawaiadalah pemberian posisi pegawai pada suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.Implementasi kebijakan public akan berjalan secara optimal jika penempatan pegawai sesuai dengan keinginannya.Begitu juga sebaliknya,implementasi kebijakan public tidak berjalan optimal jika penempatan pegawai tidak sesuai dengan keinginannya.

(2).Insentif (*Incentives*),

Insentif adalah tambahan penghasilan yang diterima staf di luar gaji pokok.Implementasi kebijakan public berjalan optimal jika Insentif yang yang diterima staf dianggap cukup.Begitu juga sebaliknya, Implementasi kebijakan public berjalan tidak optimal jika Insentif yang yang diterima staf dianggap kurang

4).Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan.Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Adapun aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

1).SOP (*Standard Operating Procedure*)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kegiatan.Implementasi kebijakan public akan berjalan optimal dan memudahkan pelaksana kebijakan jika para birokrasi dalam menjalankan SOP sesuai dengan kepentingan publikBegitu juga sebaliknya, Implementasi kebijakan public akan berjalan kurang optimal dan menyulitkan pelaksana kebijakan jika para birokrasi menjalankan SOP sesuai dengan kepentingan pribadi / golongan / kelompok.

2).Fragmentasi (*fragmentation*)

Fragmentasi adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit birokrasi.Implementasi kebijakan public berjalan optimal jika terjadi pemusatan wewenang dalam penyelesaian masalah diantara unit-unit birokrasi.Begitu juga sebaliknya,implementasi kebijakan public kurang berjalan optimal jika terjadi penyebaran wewenang dalam penyelesaian masalah di antara unit- unit birokrasi.

C.Konsep Pendidikan Gratis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, 2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.(3). bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

.(4) bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan. Ada dua hal khusus yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan yang pertamamenetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD,

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional BabI ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.dan Bab II dasar fungsi dan tujuan pasal 3 menjelaskan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Bab III prinsip dan penyelenggaran pendidikan pasal 4 menjelaskan pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa

Dalam Bab IV Hak dan kewajiban warga negara, orang tua,masyarakat dan pemerntah pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. dan Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan,.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No.3 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pendidikan gratis, bahwa dalamrangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA danSMK negeri/swasta dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional Pasal 6 ayat .2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Masalah pokok pada bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun menuju penuntasan pendidikan 12 tahun pada tingkat pendidikan lanjutan. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, terutama dalam pengadaan buku dan berbagai pengutan. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran,standar kompetensi lulusan,standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,standar kompetensi sarana dan prasarana,standar pengelolaan,standar pembiayaan,dan standar penilaian. Penyelenggaraan ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan manusia berkualitas.

Peraturan Daerah no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab II tentang Lingkup, Fungsi dan Tujuan Bab III tentang Hak dan Kewajiaban Pemerintah Daerah, peserta didik, tenaga pendidik dan Bab IV tentang larangan digambarkan bahwa:

1.Pendidikan Gratis dilaksanakan pada sekolah Negeri maupun Swasta untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta.

2.Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

3.Pendidikan Gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bermutu.

4.Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik

5.Kepala sekolah dan / atau guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orangtua peserta didik.

.Landasan operasional pemanfaatan anggaran pendidikan gratis diatur dalam bentuk Peraturan bupati.Setiap tahun anggaran Peraturan bupati tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis selalu berubah-ubah karena disesuaikan dengan pemanfaatan anggaran setiap tahun anggaran. Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Bupati nomor 222 / III / 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.

Adapun aspek –aspek yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 222 / III / 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis tanggal 15 Maret 2013 sebagai berikut:

1).tahapan pencairan anggaran pendidikan gratis

2).besarnya biaya operasional anggaran pendidikan gratis / siswa / bulan

3).jumlah jam mengajar yang dibayarkan./rombongan belajar

4).jumlah jam remedial pembelajaran yang dibayarkan / rombongan belajar

5).tata cara pembayaran insentif tenaga pendidik

6.tata cara perhitungan cara membayarkan jumlah jam mengajar / rombongan belajar.

7.tatacara pemotongan pajak penghasilan (PPh.Ps.21).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

8.dokumen laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis(lampiran)..

D.Konsep Pendidikan sebagai Human Investment

Investasi Sumber Daya Manusia di suatu negara bukanlah merupakan investasi individu melainkan investasi negara bagi pembangunan sumber daya manusia warga negaranya agar mereka mampu berdaya saing tinggi secara riil mampu mensejahterakan dirinya.Investasi sumber daya manusia ini memang berakses pada investasi pendidikan yang secara persfektif dapat merupakan kontribusi pendidikan bagi pembangunan.

Pendidikan dianggap sebagai suatu alat utama untuk meningkatkan kesadaran politik dan sosial dan menyediakan tenaga terlatih untuk proses produksi dalam perekonomian modern. Diawal tahun 2000, pandangan umum tentang pembangunan telah diperluas; urusan produksi yang lebih besar telah ditambah dengan urusan kesejahteraan manusia dan pengurangan kemiskinan. Pendidikan dilihat sebagai kebutuhan dasar manusia, sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya dan sebagai kegiatan yang mempertahankan dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumberdaya modal fisiknya. Pendidikan-investasi dalam modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan sehingga dikatakan harus melalui suatu spectrum yang luas dalam isi dan bentuk. Indonesia sebagai Negara berkembang mendidik lebih banyak penduduknya daripada yang pernah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilakukan sebelumnya. Ratio pendaftaran di semua tingkat telah meningkat hingga suatu keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara pengeluaran biaya oleh pemerintah di sector pendidikan terus meningkat. Berbagai upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan mutu system pendidikan dan untuk meningkatkan relevansi pendidikan demi kebutuhan nasional. Meskipun demikian masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.

Suryono (2008: 206) mengungkapkan investasi terhadap sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan pendidikan maupun pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi investasi sumber daya manusia tidak akan terlepas dari kendala biaya, karena dana yang ada terbatas. Dengan demikian dapat dikemukakan karakteristik dari investasi sumber daya manusia antara lain : a). Mengandung resiko biaya; b). Sifatnya jangka panjang sehingga manfaatnya baru dapat dirsakan dalam waktu yang lama; c).Resiko bahwa pendidikan yang ditempuh kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Meskipun demikian investasi sumber daya manusia memberikan pilihan aplikasi berbiaya murah yang cukup bervariasi karena tidak semua investasi sumber daya manusia itu harus dilakukan dengan melalui pendidikan yang mahal. Alternative pilihan untuk investasi sumber daya manusia dapat disebutkan antara lain a). Pendidikan formal yang berjenjang dan bertingkat sperti TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi; b). Pendidikan Non Formal seperti pelatihan .

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

E. Konsep Pendidikan Berkeadilan

Mengangkat asas persamaan hak dalam mengenyam pendidikan, wacana menggratiskan pendidikan untuk semua tanpa pandang bulu nampaknya akan segera diluncurkan dengan kenaikan anggran 20 % untuk pendidikan. Skeptisme publik terhadap wacana tersebut sangat terlihat jelas ketika masyarakat mulai mempertanyakan akankah program itu terlaksana. Polemik yang mungkin terjadi adalah adanya kecemburuan sosial dikalangan warga miskin karena dengan gratisnya pendidikan maka ini berarti si kayapun akan di gratiskan. Apakah ini adil ?

Pola pendidikan yang seharusnya digiatkan pemerintah dalam level pemerintahan apapun menurut tafsir adalah pendidikan yang berkeadilan, intinya suatu program yang dimaksudkan untuk tujuan yang baik haruslah dijalankan sesuai dengan porsi dan obyek sasarannya jangan sampai orang yang tak layak mendapatkan ' bantuan pendidikan itu.Padahal disisi lain tersebar anak miskin yang membutuhkan bantuan untuk sekedar bisa melangkahkan kaki ke sekolah. Seharusnya kalau pemerintah memang berniat menggulirkan anggaran yang sedemikian banyak untuk membantu anak bersekolah ada baiknya menggunakan sistem berkeadilan. Anak miskin digratiskan, anak sangat miskin di subsidi, anak kaya bayar mahal. Ini wajar kalau akan diterapkan seperti itu karena ada unsur keadilan di dalamnya.

Pendidikan gratis nampaknya tidak akan pernah terwujud sepanjang ' pola gratis tanpa pandang bulu tetap diterapkan. Pendidikan gratis semula ditujukan untuk anak kurang mampu agar bisa terakses dalam pendidikan artinya jangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sampai ada anak yang tidak bersekolah hanya karena anak kaya mendapat jatah yang sama dengan pelajar miskin.

Pemerataan pendidikan perwujudannya bukan hanya sekedar didukung oleh anggaran yang besar akan tetapi ada faktor lainnya yakni peralatan pendidikan yang mencukupi kurikulum yang tepat dan banyak lagi faktor lainnya yang menjadi tolok ukur kualitas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah jangan hanya terpaku pada penyusunan anggaran 20 %.

F.Konsep Biaya Pendidikan

Untuk mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar memerlukan alokasi pendanaan yang luar biasa dengan harapan agar penyelenggara pendidikan dapat memberi pelayanan pendidikan gratis yang bermutu. Untuk itu kita harus berterima kasih pada tuntutan PGRI agar anggaran biaya pendidikan 2009 menjadi 20 %.Seiring dengan rencana 20 % anggaran tersebut telah muncul Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 48 tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar dan pendanaan pendidikan ini membuktikan bahwa pemerintah akan serius mengatasi pendidikan dengan menambah anggaran biayanya walaupun ada pos DSP yang jadi hilang. Muncul berbagai pertanyaan apakah pemerintah akan sanggup menjamin biaya pendidikan benar-benar gratis dengan memberdayakan kenaikan anggaran 20 %? Apakah dengan besarnya alokasi anggaran nanti mengakibatkan partisipasi masyarakat jadi berkurang ? Bagimana sesungguhnya sumber biaya pendidikan yang saat ini masih berjalan paparan dibawah ini mungkin bisa memperjelas pos-pos biaya pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun 2004-2009 total anggaran pada tahun 2009 akan mencapai 212, 64 triliun Sumber biaya pendidikan ditujukan untuk pemerataan dan peluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik bersumber pada APBN, APBD dan dana masyarakat. Dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dicanangkan pada tahun 5 % dari PDB pada tahun yang sama. Anggaran pendidikan pada pemerintah pusat pada tahun 2009 akan mencapai 127,34 triliun sedangkan sektor pendidikan pada pemerintah daerah akan mencapai 85,30 triliun. Angka pertumbuhan ini pada tahun 2005 sebesar 9,3 % dan pada tahun 2009 sebesar 20 % a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN, sebagai pos pendanaan merupakan totalitas anggaran Negara untuk berbagai jenis aktifitas. Anggaran pendidikan di dalam pos APBN terdiri dari dua jenis yakni *pertama* Anggaran rutin dimana didalamnya terdiri atas gaji, belanja barang dan biaya operasional. *Kedua* anggaran pembangunan dimana didalamnya termasuk anggaran pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan, peralatan pendidikan serta berbagai program pembangunan non fisik.

Sedangkan alokasi biaya pendidikan didistribusikan pada tiga departemen yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Untuk Diknas sendiri angka menunjukan pada tahun 1995 sebesar 6.143.2 trilyun rupiah dan pada tahun 1999 mengalami peningkatan menjadi 14. 957.900 trilyun rupiah. Pendistribusian ini didasarkan atas sumber dana dan jenjang pendidikan dimana 66 % di distribusikan untuk pendidikan dasar sampai dengan SLTA sementara 28 % lainnya untuk Perguruan Tinggi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Adapun data distribusi anggaran pendidikan berdasarkan sumber dana per jenjang pendidikan diperoleh data bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi swasata sebesar 51 %, untuk Pendidikan dasar sebesar 38 % dialokasi di Departemen Dalam Negeri dan sebesar 4 % dialokasikan untuk pendidikan SD MI dan keagamaan lainnya.Disamping itu sumber dana pendidikan perguruan tinggi bisa juga di dapat dari anggaran pembangunan atau dalam bentuk SPP.

Sumber dana untuk pendidikan dari APBD ada beberapa jenis antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah dan dari pajak. Kebersamaan dalam mengelola pendidikan di daerah merupakan wujud upaya mengembangkan kemandirian pengelolaan pendidikan, sehingga pemberdayaan semua potensi untuk membiayai pendidikan dapat dibangun. Berbagai sumber-sumber daya masyarakat terutama yang dapat digali dilingkungan seperti potensi perekonomian lokal dan berbagai keunggulan yang ada di masyarakat merupakan faktor yang dapat membangun pendidikan atas dasar kebersamaan antara pengelola pendidikan dan masyarakat.

G.Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolab/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hal ini untuk menjadikan organisasi tetap bertahan dan terus melangsungkan kehidupannya, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik.

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan secara spesifik dilihat dari persepsi masyarakat luas dapat disebabkan oleh bumknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumberdaya manusia.

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat (Rini, 2011:81). Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (basil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible (dapat dipegang) maupun yang intangible (tidak dapat dipegang) (Suryosubroto, 2010:210).

Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki "mutu" akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya (Sallis, 2006:52)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Mutu berarti sesuatu yang dinilai dari tingkat keunggulan. Mutu dalam konsep yang absolut berarti harus high quality atau top quality. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, meubel mewah, perabot mewah.

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, produk/output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses. Proses pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAIKEM yang efektif. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan.

Pandangan secara umum banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di labratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan secara professional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Standar nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan norma dalam pendidikan.

Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang professional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara professional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompeten.

Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis, dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum, yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Sallis, 2006: 30-31).

Banyak aspek yang berkaitan dengan mutu pendidikan, dan banyak pula pandangan yang komprehensif mengenai mutu pendidikan. Hal ini penting untuk melihat kondisi pendidikan secara utuh, meskipun secara praktis fokus dalam melihat mutu bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan. Mutu pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tanpa disadari, namun ini merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar untuk memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan mempunyai kesesuaian dari rendah ke tinggi sehingga berkedudukan sebagai suatu variable. Pendidikan sebagai suatu sistem, variabel kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel bebas yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualitas guru, anggaran, kelengkapan fasilitas belajar, dan sebagainya.

Kita memang bisa mengetahui mutu ketika kita mengalaminya, tetapi kita merasa tetap kesulitan ketika mendiskripsikan dan menjelaskannya. Meskipun tidak ada definisi mengenai mutu/kualitas yang dapat diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat persamaan dalam faktor-faktor antara lain:

a. mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
b. mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan
c. mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang)

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaraan akan dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga professional kependidikan dapat disediakan di sekolah (Fattah, 2009:90).

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

a).standar isi.b). standar proses c). standar kompetensi lulusan.d). standar pendidik dan tenaga kependidikan.e). standar sarana dan prasarana.f). standar pengelolaan,g). standar pembiayaan.h). standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta keberadaan bangsa yang bermartabat.

. Dalam hubungan dengan faktor berpengaruh pada kualitas pendidikan, hasil studi *Heyman* dan *Loxley* tahun 1989 (Mintarsih Danumihardja 2004 : 6) menyatakan bahwa factor guru, waktu belajar, manajemen sekolah, sarana fisik dan biaya pendidikan memberikankontribusi yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah menjadi salah satu factor penting untuk dapat memenuhi kualitas dan prestasi belajar, dimana kualitas dan prestasi belajar pada dasarnya mengagambarkan kualitas pendidikan. Sementara itu *NanangFatah* (2000 : 90) mengemukakan upaya peningkatan mutu dan perluasan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga factor utama yaitu (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap ketrampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga professional kependidikan dapat disediakan di sekolah.

Dalam bidang pendidikan, yang termasuk input dalam konteks pengukuran kualitas hasil pendidikan adalah Siswa dengan seluruh karakteristik personal serta biaya yang harus dikorbankan untuk memperoleh pendidikan/mengikuti sekolah, dan komponen yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah sebagai suatu institusi adalah guru dan SDM lainnya, kurikulum dan bahan ajar, metode pembelajaran, sarana pendidikan, system administrasi, sementara yang masuk dalam komponen output adalah hasil proses pembelajaran yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

H. Mutu Pendidikan Yang Direncanakan

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tentunya dibutuhkan perencanaan program pendidikan yang baik Dalam perencanaan pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas perlu memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi, strategi-strategi yang tepat, langkah-langkah perencanaan dan memiliki kriteria penilaian (Nurkholis, 2003 :74-78).

Suksesnya perencanaan pendidikan diperlukan beberapa kondisi, yakni: 1) adanya komitmen politik, 2) perencana pendidikan harus tahu betul apa yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menjadi hak, tugas dan tanggung-jawabnya, 3) hams ada perbedaan yang tegas, antara area politis, teknis, dan administratif, 4) perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan politis, 5) perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah, 6) tugas utama perencana pendidikan adalah pengembangan secara terarah dan memberikan alternative teknis sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik pendidikan, 7) harus mengurangi politisasi pengetahuan, 8) harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan, 9) administrator pendidikan hams lebih aktif mendorong pembahan-pembahan dalam perencanaan pendidikan, 10) ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan maka harus lebih diupayakan kerja-sama yang saling menguntungkan antara pemerintah-swasta-universitas yang memegang otoritas pendidikan.

Dalam perencanaan pendidikan ada dua strategi penting, yaitu 1) penetapan target dan 2) penetapan prioritas. Menyangkut strategi yang kedua terdapat enam area kritis yang hams dipertimbangkan, yaitu pilihan antara tingkat pendidikan, pilihan antara kuantitas dan 'mantas, pilihan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan budaya, pilihan antara pendidikan formal dan pelatihan nonformal, pilihan tentang insentif serta pilihan tentang tujuan pendidikan..

Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan adalah kegiatan analisis keadaan sekarang, perkiraan keadaan yang akan datang, perumusan tujuan yang akan dicapai, analisis dan diagnosis, pengembangan alternatif, proses

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, penentuan program dan prioritas, perhitungan anggaran, perumusan rencana, penyusunan rincian-rencana, evaluasi rencana dan revisi rencana.

Dalam perencanaan pendidikan, terdapat tujuh kriteria penilaian desain dan implementasi kualitas program akademik, yaitu atraktif, bermanfaat, kongruen, berciri khusus, efektif, fungsional dan pertumbuhan siswa. Program pendidikan yang berkualitas apabila:

a. Menarik atau atraktif bagi pelanggan, dan responsif terhadap kebutuhan dan ketertarikan populasi khusus saat itu atau calon siswa.
b. Memperhatikan masalah, kebutuhan dan perhatian masyarakat serta bermanfaat bagi pelanggan.
c. Kongruen, artinya terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dengan kenyataan.
d. Memiliki cirri khusus atau berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain (distinctive).

e.Efektif, artinya hasil belajar yang dimaksud telah didefinisikan secara jelas dan pencapaian belajar didokumentasikan serta dikomunikasikan secara persuasif. Oleh karena itu perlu ada evaluasi untuk mengetahui hasil yang diharapkan sudah tercapai atau belum.

f.Fungsional, artinya memiliki kebebasan belajar dan menfokuskan pada pengalaman belajar yang akan mempersiapkan dan membantu peserta didik untuk mengembangkan intelektualitas, personal, pekerjaan atau keterampilan khusus, etika dan sikap yang akan bermanfaat dalam kehidupan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

g.Memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan peserta didik dalam segala aspeknya (kognitif, afektif, moral, sosial, fisik, dan dimensi-dimensi intrapersonal).

I.Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti 1) meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile), 2) membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning), 3) menciptakan kesempatan belajar barn di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur, 4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, 5) membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayatr hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan (John Bishop, dlm Nurkolis, 2003: 78-79).

Kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Edwar Deming, Paine, dick tahun 1982 (Daniel Kambey, 2004:34-45; Suryosubroto, 2004:198). TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menerus di mana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan masa kini dan di masa mendatang. TQM TQM Merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

14. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikutsertakan kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, ketrampilan, bahan atau jasa. Partisipasi dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan mereka sendiri (Erdawati dalam Muhidin, 2008:1).

Bentuk partisipasi masyarakat antara lain: (a) kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, (b) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah, (c) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, (d) keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah, (e) keterlibatan masyarakat dalam mempertanggunggjawabkan keberhasilan sekolah (Erdawati dalam Muhidin, 2008:11).

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi: (a) memajukan kualitas belajar, (b) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, (c) meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, (d)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, (e) mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan (Erdawati dalam Muhidin, 2008:1).

Bentuk dukungan partisipasi masyarakat (dunia industri) terhadap sekolah diantaranya adalah: (a) memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang mutakhir, (b) penyelenggaraan magang/praktik kerja industri/praktik kerja lapangan siswa, (c) pelaksanaan uji kompetensi siswa/evaluasi belajar, (d) rekruitmen tenaga kerja (Korneli dalam Muhidin, 2008: 12).

II.Penelitian Terdahulu

1. Dahlan, Muhammad Arif (2013). Kebijakan Pendidikan Gratis Di Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang. Tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis hasil kebijakan ini, bagaimana penerapan dan pelaksanaannya, dan apa isu-isu yang berkaitan kebijakan ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi teoritis dan praktis. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan gratis proses konsultasi terhadap stakeholders pendidikan di Kabupaten Rembang tidak dilakukan dengan maksimal. Akibatnya adalah proses implementasi kebijakan pendidikan gratis mengalami berbagai kendala. Tahun 2010 alokasi anggaran kebijakan pendidikan gratis tidak berjalan dengan konsisten. Akibatnya adalah banyak program sekolah yang sudah direncanakan menjadi terbengkalai. Celakanya pihak sekolah menyelesaikan kendala ini dengan melakukan penarikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kembali kepada peserta didiknya yang sebetulnya dalam Perbup dan MOU (Memorandum Of Understanding) kebijakan pendidikan gratis dilarang. Tidak tepatnya sasaran kebijakan pendidikan gratis jenjang Pendidikan Dasar. Sehingga alokasi anggaran dinilai juga tidak tepat sasaran. Kemudian dalam pembiayaan yang melibatkan peran serta masyarakat, secara faktual juga tidak mengedepankan asas keadilan.

2.Gunistyo, Yayat Hidayat Amir, Siswanto, Agus Setio Widodo, dan Inayah Adi Sari (2013). Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar Gratis Di Kota Tegal. Kegiatan kajian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kesesuaian implementasi program dengan kebijakan program, (2) Mengetahui performa kegiatan berupa kecukupan biaya, tingkat ketepatan penggunaan biaya dan akuntabilitasnya dari sisi keluaran, dampak, dan manfaatnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemkot Tegal kurang akomodatif terhadap peningkatan kebutuhan riil di SMP-SMP yang siswanya berstatus sosial ekonomi rendah, meskipun nominalnya masih lebih sedikit dibanding peruntukan SMP-SMP yang siswanya berstatus sosial ekonomi menengah.

3.Dr. Jusdin puluhulawa,M.Si& Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, Sh.,M.Hum (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo. Tujuan dalam penelitian ini Mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo, Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo, Mengkaji, merumuskan model alternatif kebijakan pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

gratis dan implementasinya di Provinsi Gorontalo. rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah formulasi rumusan kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo, implementasi kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo, rumusan dan implementasi model alternatif kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa dokumen, informan, tempat dan peristiwa. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa nggaran operasional implementasi kebijakan pendidikan gratis bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Provinsi Gorontalo dalam bentuk hibah, yang diserahkan langsung melalui rekening sekolah, tanpa adanya potongan. Organisasi pelaksana atau tim manajemen yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo menunjukkan lebih membangun hubungan koordinatif secara tidak langsung dengan tim manajemen satuan pendidikan dalam hal ini sekolah, melalui organisasi pelaksana di Kabupaten/Kota. Oleh karena secara khirarhi atasan langsung ekolah/madrasah adalah pemerintah Kab/Kota/ dan Kementerian agama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat, pada pasal 13 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 186/07/VI/2013 tentang pembentukan tim manajemen, bahwa struktur organisasinya hanya sampai tingkat Kab/Kota.

4. Muhammad Fachrizal Abubakar,Hartutiningsih, Muh Jamal Amin. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini mengunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustaka, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibututhkan dalam penelitian.Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor). Alokasi dana sekolah ke penerima dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA. Penyaluran dana penggunaan dana, yang diberikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah masih belum tepat tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan waktu kepada setiap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sekolah untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban.

5.Siti Markhamah. Implikasi Kebijakan Sekolah Gratis Terhadap Eksistensi Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam di Surakarta Tahun 2010-2014 (2015). Didalam penelitian ini membahas mengenai implikasi yang dihadapi sekolah swasta Islam terkait kebijakan sekolah gratis yang diterapkan di sekolah-sekolah negeri, hal-hal yang dilakukan sekolah swasta Islam sehingga mampu mempertahankan eksistensinya, dan peroses pembiayaan sekolah swasta Islam untuk meningkatkan kualitas sekolah.Tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dikarenakan kebijakan sekolah gratis terhadap keberadaan sekolah swasta dan cara mengatasinya.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitik.Berdasarkan analisis data penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pengaruh kebijakan sekolah gratis terhadap eksistensi sekolah swasta Islam di Surakarta tidaklah terlalu berpengaruh apabila sekolah swasta memiliki program-program unggulan sehingga mampu untuk menarik perhatian dari masyarakat sehingga walaupun biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri pada umumnya, tetapi sekolah swasta tersebut tetap dapat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan prestasinya dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta tersebut.

III.Kerangka Berpikir

Implementasi Perda no,3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar terjadi kontradiksi antara Bab III tentang hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan sesuai karakteristik perkembangannya (bakat,minat dan kompetensinya) dengan Bab IV tentang larangan bagi kepala sekolah dan atau guru melakukan pungutan.Fakta ini membingungkan kepala sekolah dan atau guru di sekolah.Bisa jadi implementasi kebijakan pendidikan gratis dapat penghambat atau dan juga dapat menjadi pendorong dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.Dalam hal ini tentu ada factor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar,maka Edward (dalam Nawawi,2007) mengemukakan bahwa ada empat aspek yang berkaitan dengan dimensi kebijakan public yang perlu diperhatikan yaitu : 1) komunikasi menyangkut transmisi,kejelasan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

konsistensi informasi karena alat dan cara.2).Sumber daya menyangkut Sumber Daya Manusia / staf, anggaran dan fasilitas.3).Disposisi menyangkut perilaku staf atau pegawai 4.Struktur birokrasi menyangkut struktur organisasi dan perilaku birokrasi.

Untuk memperjelaas alur peneltian ini,maka dirumuskan dalam bentuk skema kerangka pemikiran pada table 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Skema Kerangka Berpikir

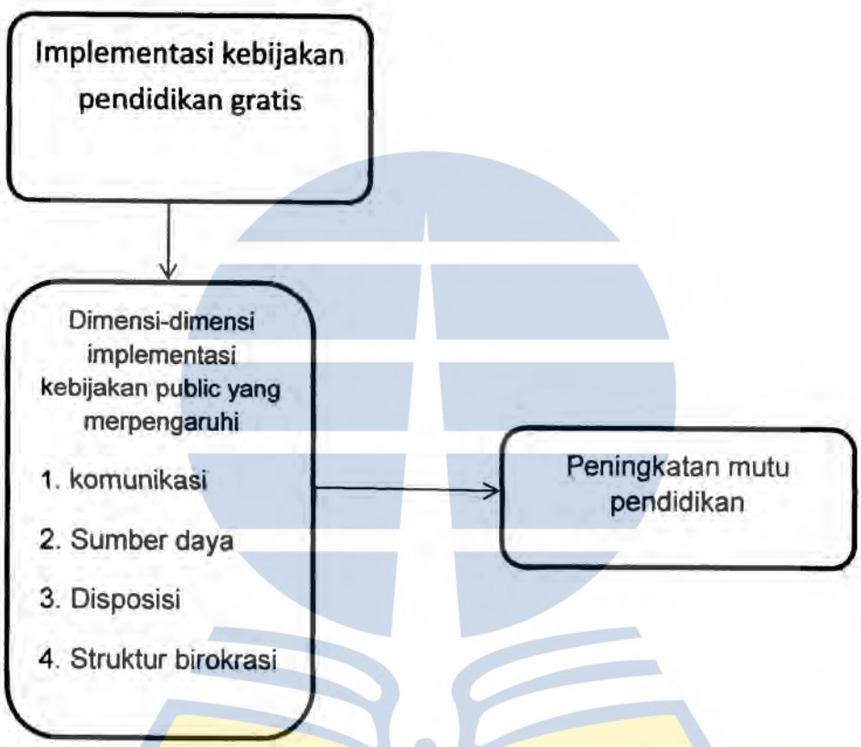

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

IV.Defenisi Operasional

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau penerapan suatu keputusan kebijakan yang berbentuk Perda
2. Pendidikan gratis adalah program untuk membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi orangtua siswa yang kurang atau tidak mampu.
3. Mutu pendidikan adalah hasil yang dicapai berupa pengetahuan,sikap dan keterampilan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini akan dibahas lima aspek yaitu 1.Desain penelitian 2.Lokasi Penelitian. 3.instrument penelitian.4.Informan Kunci 5.Prosedur Pengumpulan Data. 6. Metode analisis data. Dan keenam aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

Kelima aspek tersebut di atas akan dibahas di bawah ini :

A. . Desain Penelitian

Sebuah penelitian agar berhasil dengan baik diperlukan suatu desain yang tepat.Desain yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian. Menurut Suryabrata (2000) "desain penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi". Dalam menentukan desain penelitian yang akan. digunakan perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini desain yang dipergunakan adalah desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data yang real sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. , menurut Nasution (1995) bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang-orang dalam lingkungan mereka berinteraksi dengan mereka.Sementara itu, Bogdan Taylor seperti dikutip Moleong (1990) menjelaskan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Bertolak dari berbagai pandangan tersebut di atas maka metode kualitatif pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan titik pandang yang menggambarkan bahwa pendekatan metode kualitatif tersebut adalah berbentuk deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri atas pulau-pulau,maka lokasi penelitian ini hanya dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.Peneliti tertarik untuk menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lokasi penelitian karena implementasi kebijakan pendidikan gratis merupakan program unggulan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.

C.Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan adanya teknik dan instrumen pengumpulan data guna mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Menurut Ali (2001:35): Berdasarkan jenis perolehannya data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang tersedia dan diperoleh sebagai hasil pengolahan data primer atau data menyangkut keadaan sesungguhnya dari sesuatu kondisi.Sedangkan data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui alat pengumpul data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini guna memperoleh data yang akurat dan berkualitas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.Observasi

Menurut Kriyantono (2008:106) mengatakan bahwa metode Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. tentang factor-faktor yang mempengruhiimplementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan selama 3 bulan yakni mulai bulan September s.d November 2013.

Adapun instrument observasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang terdapat pada table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 : Instrumen Observasi

INSTRUMEN OBSERVASI

Nama Sekolah :.....

Hari / Tanggal :.....

Nama Observer : .....

Tujuan :

1. Merekam data factor-factor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan gratis di SDN Parangia kabupaten Kepulauan Selayar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Petunjuk :

1. Observer mengamati factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi : 1.komunikasi 2). sumber daya 3). Disposisi 4), Struktur birokrasi.
2. Observer mencatat hal-hal yang dianggap relevan dengan data penelitian.

No	Aspek-aspek yang diamati	Aktivitas observer
1	2	3
I	**Faktor –faktor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan pendidikan gratis**	
A	Komunikasi :	
1.	Alat yang digunakan	
	a,Jumlah alat	
.	b.kondisi alat	
2	Cara	
	a.penyelenggara	
	b.panitiaPenyelenggara	
	c.peserta	
	d.pemateri	
	e.materi	
	f.waktu pelaksanaan	
	g.anggaran	
B.	Sumber daya	
1.	staf	
	a.jumlah staf	
	b.kedudukan,fungsi dan tugas	
	b.kemampuan staf	
2.	Anggaran	
	a.sumber anggaran	
	b.jumlah anggaran	
	c. pemanfaatan anggran	
3.	Fasilitas	
	a.jumlah fasilitas	
	b.kondisi fasilitas	
4.	Disposisi	
	a.perilaku staf	
5.	Struktur birokrasi	
	a.struktur organisasi	
	b Birokrasi	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Wawancara.

Moleong (2005:186) menyatakan wawancara merupakan percakapan oleh dua pihak yaitu orang yang mewawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah kepala sub seksi hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dan staf tata usaha sub seksi hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar, selaku pihak yang benar-benar memahami implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar Kepala sekolah SDN Parangia,Kepala SMP Negeri 2 Bontomatene, dan Kepala sekolah MA Benteng.selaku pengelola anggaran pendidikan gratis.

Adapun instrumen wawancara yang kami gunakan pada penelitian ini adalah sebagaimana yang terlihat dalam table 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2 :Instrumen wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Identitas :.....

1.Nama :.....

2.Masa keja :.....

3.Tingkat pendidikan : 1.S 3
2.S 2
3.S 1
4. D 3
5. D 2
5.D 1
6. SMU / SMK dan sederajat
7.SMP sederajat
8.SD atau sederajat

4.Pekerjaan :.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

5.Pangkat / Golongan :.....

6.Instansi tempat bekerja :.....

7.Alamat :.....

No.	Pertanyaan
I,.	Komunikasi
	a. Alat
	1. Menurut pendapat saudara, alat –alat apa sajakah yang digunakan dalam kegiatan komunikasi implementasi kebijakan pendidikan gratis ?
	2.Menurut pendapat saudara,mengapa alat-alat seperti laptop,LCD,white board,mikropon,dan sound system,meja dan kursi sangat diperlukan dalam kegiatan komunikasi implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	b.Cara
	1. Menurut pendapat saudara, cara apa yang digunakan dalam kegiatan komunikasi implementasi kebijakan pendidikan gratis ?mengapa sosialisasi itu penting dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis ?
	a.Penyelenggara
	1.Menurut pendapat saudara,siapa sajakah panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?.
	.2.Menurut pendapat saudara,adakah susunan panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

	.3. Menurut pendapat saudara,mengapa Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd yang ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara?
	.b.Tempat
	1.Menurut pendapat saudara,di mana kegiatan sosialisasi sosialisasi?
	.c.Peserta
	1.Menurut pendapat saudara,siapa sajakah yang diundang dalam sosialisasi?
	2.Menurut pendapat saudara,apakah semua yang diundang hadir?
	d.Pemateri
	1. Menurut pendapat saudara.siapa pemateri yang dipilih dalam kegiatan sosialisasi?
	e.Materi
	1. Menurut pendapat saudara,materi apa sajakah dalam kegitan sosialisasi ?
	f.Waktu sosialisasi
	1.Menurut pendapat saudara.pada hari apa biasanya kegiatan sosialisasi sering dilaksanakan ?
	2. Menurut pendapat saudara., kegiatan sosialisasi itu disesuaikan dengan kondisi kadang 4 jam dan kadang 6 jam ?
	g.Anggaran sosialisasi
	1.Menurut pendapat saudara,berapa anggaran yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi?
	2.Menurut pendapat saudara siapa yang menyiapkan anggaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	sosialisasi?
II.	Sumber daya
	a.Staf
.	1.Menurut pendapat saudara. berapa jumlah staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis ?
	2.Menurut pendapat saudara,bagaiman susunan staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	2.Menurut pendapat saudara,apa nama staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	3.Menurut pendapat saudara,bagaimana kedudukan ,fungsi dan tugas staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	4.Menurut pendapat saudara,bagaimana kompetensi dan skill yang dimiliki staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	b..Aggaran.
	1. Menurut pendapat saudara.dari manakah sumber anggaran pendidikan gratis yang diperoleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis?
	2. Menurut pendapat saudara,berapakah jumlah anggaran pendidikan gratis yang diterima oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis
	3.,Menurut pendapat saudara,bagaimana cara pemanfaatan anggaran pendidikan gratis baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah propinsi Sulawsi Selatan dan Pemerintah Daerah kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	Kepulauan Selayar?
	4. Menurut pendapat saudara mengapa jumlah anggaran pendidikan gratis yang diterima setiap satuan dan jenjang pendidikan berbeda-beda.
	c.Fasilitas
	1.Menurut pendapat saudara, fasilitas apa sajakah yang dimiliki tim pengendali Program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar?
III.	Disposisi
	1.Menurut pendapat saudara,bagaimanakah perilaku tim pengendali Program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar?
IV	Sruktur birokrasi
	1.Menurut pendapat saudara.apakah yang dimaksud dengan struktur organisasi?
	2.Menurut pendapat saudara. bagaimanakah susunantim pengendali Program Pendidikan Gratis ?
	3. Menurut pendapat saudara,bagaimana manfaat struktur organisasi untuk tim pengendali Program Pendidikan Gratis?
	4.Menurut pendapat saudara,bagaimana perasaaantim pengendali Program Pendidikan Gratisdengan adanya struktur organisasi?
	5.Menurut pendapat saudara, bagaimanaproses pemeriksaanLaporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikanoleh tim

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	pengendali Program Pendidikan Gratis?

3.Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen tertulis yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Meliputi kajian-kajian teori para ahli yang relevan dengan penelitian, dokumen berupa :.arsip kegiatan sosialisasi,5).DIPA anggaran pendidikan gratis., dan struktur organisasi.

Studi dokumentasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi tentang implementasi Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.dan factor-faktor yang mempengaruhinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar ,

D.Informan Kunci

Menurut Arikunto (2001:114) "Informan kunci adalah sumber data dalam penelitian darimana data dapat diperoleh". Dari pendapat tersebut, adapun yang menjadi Informan kuncipenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala sub seksi hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar, selaku ketua tim pengendali ProgramPendidikan Gratis.Penentuan Kepala sub seksi hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan objektif, mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Staf iata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3 orang.

3.Kepala SDN Parangia,Kepala SMPN 2 Bontomatene dan kepala Madrasah Aliyah(MA) Benteng selaku pihak pengelola anggaran pendidikan yang dapat memberikan informasi terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan .Dalam penelitian ini ,yang menjadi informan sebanyak 3 orang.

. Pengambilan data ini yang dilakukan secara purposif (purposive sampling).Arikunto, (2001) menyatakan purposive sampling adalah "pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja didasari dengan beberapa pertimbangan". Pertimbangan tersebut misalnya adalah mereka adalah pihak yang dapat memberikan informasi actual dan terkini tentang implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar.selama pelaksanaan penelitianyakni 3 bulan, dapat ditemui serta bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Cara mendapatkan data tersebut adalah penulis meminta data pada semua stake holder dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar yang bersedia memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian sebanyak 7 orang.

E.Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen.Informan yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 7 informan, terdiri dari 4 informan dari pihak Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar3 informan dari pihak sekolah..Pemilihan informan berdasarkan atas kemampuannya dalam memberikan informasi terhadap implementasi kebijakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan informan yang lain berdasarkan keterlibatan langsung terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian akan berlangsung selama tiga bulan yakni dari tanggal 1 September s.d 30 November 2013 di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar

F.Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriftif.Maksudnya peneliti hanya mendeskripsikan data penelitian, tanpa melakukan pengujian hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penelititidak membuat hipotesis.Selain melakukan analisis, hasil penelitian kemudian diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data hasil temuan, peneliti menganalisis hasil pengumpulan data berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh .informan.kemudian disusun secara sistematis mana data yang perlu dan sesuai dan mana yang tidak perlu (reduksi data), lalu dilakukan analisis dan interprestasi atau penafsiran dan menarik kesimpulan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini aspek –aspek yang diuraikan lebih lanjut adalah : Pertama, temuan penelitian yang meliputi a).gambaran umum Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar, b).faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikandi kabupaten Kepulauan Selayar.Kedua,pembahasan penelitian

Kedua aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut :

I.Temuan

A.Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah yang menangani masalah – masalah teknis yang berkaitan dengan bidang .pendidikan.khususnya masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Jln.Fatmawati no.169 Benteng Kepulauan Selayar.

Adapun batas-batas Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar

a.Sebelah utara berbatasan dengan jalanan menuju SMPN 2 Benteng

b.Sebelah timur berbatasan dengan perkampungan penduduk

c.Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Benteng utara

d.Sebelah barat berbatasan dengan perkampungan penduduk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupeten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, mempunyai tugas pokok :

1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan.
2) Merumuskan kebijakan tehnis, perencanaan, pengorganisasian, Pengendalian, Pengarahan dan Pengawasan serta evaluasi pembangunan di bidang pendidikan.
3) Melaksanakan bimbingan tehnis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
4) Memberdayakan peran serta masyarakat (Dewan Pendidikan) dan Pengembangan kerjasama instansi tehnis dalam pengelolaan Pendidikan.

b. Fungsi

1) Penyiapan bimbingan tehnis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
2) Pemberdayaan peran serta masyarakat (Dewan Pendidikan) dan pengembangan kerjasama antara instansi tehnis dalam pengelolaan pendidikan;
3) Mengkoordinasikan program pendidikan di tingkat provinsi dan pusat
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi

1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

2) Sekretaris sebagai unsur pelayanan tehnis administratif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, unsur umum dan Kepegawaian, Hukum dan Perencanaan, serta Unsur Keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi

a) Pelaksanaan analisis dan penilaian kinerja organisasi, penataan dan peningkatan kapasitas dan tata laksana, penyusun sistem dan prosedur kerja.
b) Pelaksanaan koordinasi perumusan program perencanaan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.
c) Pelaksanaan pengadaan, penggandaan, mutasi, pengembangan disiplin dan pemberhentian pegawai .
d) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumatanggaan, pengelolaan dokumentasi kepegawaian.
e) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
f) Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas dan mengkoordinasikan tugas kebendaharaan.
g) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program rutin dalam pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris didukung dengan 3 (tiga) kepala sub bagian yaitu ;

a) Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b) Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan.

3) Kepala Bidang Olahraga dan Pembinaan Prestasi Pelajar yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi tehnis serta evaluasi di bidang olahraga dan pembinaan prestasi pelajar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Olahraga dan Pembinaan Prestasi Pelajar didukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga dan Prestasi pelajar TK-SD.

b) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga dan Prestasi pelajar SMP,SMA dan SMK.

c) Kepala Seksi Pembinaan Guru Olahraga.

4) Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi tehnis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan dasar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar.

b) Pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar.

c) Pemberian Rekomendasi izin pembukaan TK,SD.

d) Usulan perencanaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan TK.

e) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar.

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendidikan Dasardidukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar TK/SD.

b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TK/SD

c) Kepala Seksi Tenaga Guru TK/SD

5) Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi tehnis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan menengah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah.

b) Pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pendidikan menengah.

c) Pemberian rekomendasi izin pembukaan SMP,SMA,SMK Negeri dan Swasta.

d) Usulan perencanaan sarana dan prsarana pendidikan menengah.

e) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan frofesi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan menengah.

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah didukung dengan 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Tenaga Guru SMP, SMA dan SMK

b) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah

c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6) Kepala Bidang Pendidikan non formalyang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi tehnis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan non formal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Bidang pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendidikan nonformal.

b) Pemberian bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pendidikan nonformal.

c) Pemberian rekomendasi izin pembukaan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan lembaga PAUD lainnya.

d) Penyusunan analisa kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini .

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pendidikan Non Formal, didukung 3(tiga) kepala seksi yaitu :

a) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

b) Kepala Seksi Keaksaraan

c) Kepala Seksi Kesetaraan

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Visi Dinas Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015 yaitu, " Terselenggaranya Layanan Pendidikan Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Profesional Dan Religius ".

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

b. Misi Dinas Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015 yaitu :

1) Meningkatkan Pemerataan Pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2) Meningkatkan manajemen kependidikan.
3) Meningkatkan Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
5) Meningkatkan kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan.
6) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal.
7) Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

3. Tujuan dan sasaranDinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.

a. Tujuan

Untuk mengaktualisasikan misi yang akan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Nasional , maka misi tersebut diformulasikan dalam tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan ketersediaan satuan pendidikan sesuai kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
3) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugas masing- masing.
4) Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan pada setiap satuan dan jenjana pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5) Meningkatkan kualitas pembelajaran pada setiap satuan dan jenjang pendidikan.

6) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan nonformal dan informal.

7) Meningkatkan pembinaan layanan pendidikan kepemudaan

8) Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga, seni dan keagamaan.

9) Meningkatkan pembinaan guru olahraga.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, adalah:

1) Meningkatnya akses belajar bagi anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan.

3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan.

4) Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

5) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugas yang diampunya.

6) Meningkatnya ketersediaan fasilitas pembelajaran.

7) Meningkatnya hasil ujian akhir pada setiap satuan pendidikan.

8) Meningkatnya angka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

9) Meningkatnya layanan pendidikan terhadap anak usia dini.

10) Meningkatnya layanan pendidikan kecakapan hidu (life skill) dan KBU.

11) Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

12) Meningkatnya layanan pendidikan keaksaraan fungsional

13) Meningkatnya pembinaan ekstrakurikuler di sekolah.

14) Meningkatnya prestasi pelajar di bidang olahraga.

15) Meningkatnya prestasi pelajar di bidang seni dan keagamaan.

16) Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru olahraga.

4).Faktor – factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar.

1.Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersbut serta konsistensi informasi yang disampaikan.

Untuk mencapai ketiga unsur tersebut di atas,maka aspek-aspek yang menjadi pendukung utamanya adalah meliputi : (a).Alat yang digunakan.dan (b).cara pelaksanaan.

a.Alat yang digunakan

Adapun alat yang digunakan yang berkaitan dengan komunikasi ,sebagaimana terlihat pada table 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.Jumlah alat dan kondisi

No.	Nama alat	Jumlah (buah)	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				Berat	sedang	Ringan
1.	Laptop	1	1			
2.	White board	1	1			
3	LCD	1	1			

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

4.	Mikropon	2	2			
5.	Sound system	1	1			
6	Listrik	900 Watt	900 watt			
7	Meja	3	3			
8	Kursi	400	350	20	-	30
9.	AC	-				

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.4 September 2013)

Dari keterangan Bahri staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa alat -alat yang digunakan adalah laptop 1 buah,white board 1 buah,LCD 1 buah,mikropon 2 buah,sound system 1 buah ,listrik 900 Watt,meja 3 , kursi 350 buah dan AC tidak ada. (wawancara,9 September 2013).

2.Carapelaksanaan

Cara yang digunakan dalam implemenetasi kebijakan pendidikan gratis adalah sosialisasi (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Nurhayati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa cara yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sosialisasi.(wawancara,9 September 2013).

Aspek-aspek yang berkaitan dengan sosialisasi antara lain:a).penyelenggara.b).panitia penyelenggara .c).tempat d).pemateri e).materi .f).waktu penyelenggaraan .g).anggaran

a).Penyelenggara

Penyelenggara sosialisasi Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.(data,Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa penyelenggara sosialisasi. adalah Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar (wawancara,9 September 2013).

b).Panitia Penyelenggara

Susunan panitia penyelenggara sosialisasi adalah sebagai berikut:

Ketua :Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd

Bendahara :Nurhayati

Sekretaris :Suciwati

Seksi – seksi

1.Seksi komsumsi : Anti

2.Seksi perlengkapan: Bahri

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Nurhayatistaf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwasusunan panitia penyelenggara sosialisasi adalah sebagai berikut :

Ketua :Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd

Bendahara :Nurhayati

Sekretaris :Suciwati

Seksi – seksi

1.Seksi komsumsi : Anti

2.Seksi perlengkapan: Bahri

(wawancara,9 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c).Tempat

Tempat sosialisasi SMPN 2 Benteng(data,Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi bertempat di SMPN 2 Benteng (wawancara,9 September 2013).

d),Peserta

Peserta sosialisasi yang diundang meliputi :.,Kepala sekolah ,bendahara anggaran pendidikan gratis dan ketua komite sekolah dari semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar

SD sebanyak 417 orang.MI sebanyak 42 rang SMP sebanyak 156 orang,MTs sebanyak 33 orang,SMU sebanyak 27 orang,SMK sebanyak 21 orang dan MA sebayak 3 orang.

(data Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan bahwa peserta sosialisasi yang diundang adalah kepala sekolah ,bendahara anggaran pendidikan gratis dan ketua komite sekolah dari semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayaryakni SD sebanyak 417 orang.MI sebanyak 42 rang SMP sebanyak 156

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

orang,MTs sebanyak 33 orang,SMU sebanyak 27 orang,SMK sebanyak 21 orang dan MA sebayak 3 orang (wawancara,9 September 2013).

e).Pemateri

Pemateri :Drs.Mustakim KR,M.MPd(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2913).

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan bahwa pemateri dalam sosialisasi adalah.Drs.Mustakim KR,M.MPd (wawancara,9 September 2013).

f).Materi

Materi sosialisasi adalah meliputi : (1).pemanfaatan anggaran (2).Larangan.(3).Sanksi (4).laporan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari wawancara Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Dinas Pendidikan Nasional mengatakan bahwa materi sosialisasi adalah (1).pemanfaatan anggaran (2).Larangan.(3).Sanksi (4).laporan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis (wawncara,9 September 2013).

g).Pelaksanaan

1).Teknis Pelaksanaan

Sosialisasi dibagi atas tiga tahap:

a).Tahap pertama : Sekolah Dasar / MI atau sederajat negeri dan swasta

b).Tahap kedua : SMP / MI sederat negeri dan swasta

c).Tahap ketiga : SMU ,SMK , MA sederajat negeri dan swasta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Suciwati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi dibagi atas tiga tahap yaitu :1).tahap pertama : SD / MI atau sederajatnegeri dan swasta.2).tahap kedua : SMP / MI sederat negeri dan swasta.3).tahap ketiga : SMU ,SMK , MA sederajat negeri dan swasta (wawancara,9 September 2013).

2).Waktu pelaksanaan

Sosialisasi dilaksanakan biasanya setiap bulan Januari.Hari pelaksanaan biasanya hari / tanggal : Sabtu,20 Januari 2013,tetapi kadang disesuaikan dengan kondisi).

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan biasanya

Waktu pelaksanaan sosialisasi untuk jenjang SD / MI dan sederajat baik negeri yakni Sabtu,20 Januari 2013,SMP / MTs dan sederajat negeri dan swasta Senin 22 Januari 2013,SMU.SMK.MAN Selasa,23 Januari 2013 tetapi kadang disesuaikan dengan kondisi)..(wawancara ,9 September 2013)

3).Lamanya sosialisasi

Sosialisasi kadang berlangsung 4 jam dan kadang 6 jam(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari keterangan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwasosialisasi kadang berlangsung 4 jam dan kadang 6 jam(wawancara,9 September 2013).

f.Anggaran sosialisasi

Anggaran sosialisasi dipersipkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Nurhayati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwaanggaran sosialisasi dipersiapkanoleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar (wawancara ,9 September 2013

Anggaran sosialisasi antara Rp 5.000.000 - Rp 7.000.000 (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Nurhayati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwaanggaran sosialisasi antara Rp 5.000.000 - Rp 7.000.000.(wawancara,9 September 2013).

2.Sumber Daya

Aspek-asepek yang berkaitan dengan sumber daya dalam implementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan selyar adalah meliputi :a).staf b).anggaran. c).fasilitas

a.Staf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Aspek –aspek yang berkaitan dengan staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :1).nama staf 2).jumlah staf.3) kedudukan ,fungsi dan tugas staf .4).kompetensi dan skill staf

1).Nama staf

Nama staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah tim pengembang Program Pendidikan Gratis (PPG)(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa nama stafnya adalah tim pengendali Program Pendidikan Gratis (PPG) (wawancara 9 September 2013).

2).Jumlah staf

Staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah berjumlah 7 orang.

(Data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa berjumlah 7 orang..

(wawancara,9 September 2013).

3).Kedudukan .fungsi dan tugas staf

Kedudukan ,tugas dan fungsi staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah manajerProgram Pendidikan Gratis ,ketua dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

anggotatim pengendali Program Pendidikan Gratis (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa Kedudukan ,tugas dan fungsi staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah manajerProgram Pendidikan Gratis ,ketua dan anggotatim pengendali Program Pendidikan Gratis.(wawancara ,9 September 2013).

4).Kompetensi dan skill staf

Kompetensi dan skill staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis cukup memadai (data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa Kompetensi dan skill staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis cukup memadai .(wawancara,9 September 2013).

b.Anggaran

Aspek-aspek yang berkaitan dengan anggaran antara lain :1).sumber anggaran.2).jumlah anggaran.3).pemanfaatan anggaran

1).Sumber anggaran

Anggaran pendidikan gratis bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwaanggaran pendidikan gratis bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.(wawancara .9 September 2013)

2).Jumlah anggaran

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp102.270.502.500,00dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA I buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00 (data Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00 dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA I buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00 (wawancara ,9 September 2013).

3).Pemanfaatan anggaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis adalah untuk membiayai 8 standar nasional pendidikan(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis adalah untuk membiayai 8 standar nasional pendidikan (wawancara,9 September 2013).

c.Fasilitas

Aspek –aspek yang berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki tim pengendali anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari jumlah dan kondisi.

Fasilitas yang dimiliki tim pengendali anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari jumlah dan kondisi.sebagaimana terlihat dalam table 4.2 di bawah ini: :

Tabel 4.2.Jumlah alat dan kondisi

No.	Nama alat	Jumlah (buah)	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				Berat	Sedang	Ringan
1.	Laptop	4	4			
2.	Meja	5	5			
3	Kursi	8	8			
4.	Lemari	2	2			
5.	Listrik	(900Watt)	900 Watt			
6.	AC	1	1			

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.4 September 2013)

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa dengan fasilitas yang dimiliki tim pengendali anggaran pendidikan gratis Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah laptop 4 buah,meja 5 buah,kursi 8 buah,lemari 2 buah , listrik 1 paket 900 Watt.dan AC 1 buah dalam kondisi baik (wawancara,9 September 2013)

3.Disposisi

Aspek yang berkaitan dengan disposisi adalah perilaku

Perilaku tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar antara lain ::komitmen , kejujuran ,disiplin,bertanggunjawab,lapangdada ,dan tempramen (data,Dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa perilaku staf pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar antara lain komitmen , kejujuran ,disiplin,bertanggunjawab,lapangdada ,dan tempramen (wawancara,9 September 2013)

4.Struktur birokrasi

Aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur organisasi antara lain:1).struktur organisasi .2).perilaku birokrasi

1).Struktur Organisasi

Skema struktur organisasi tim pengendali Program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlihat pada table 4.3 di bawah ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.3.Skema struktur organisasi tim pengendali Program Pendidikan Gratis

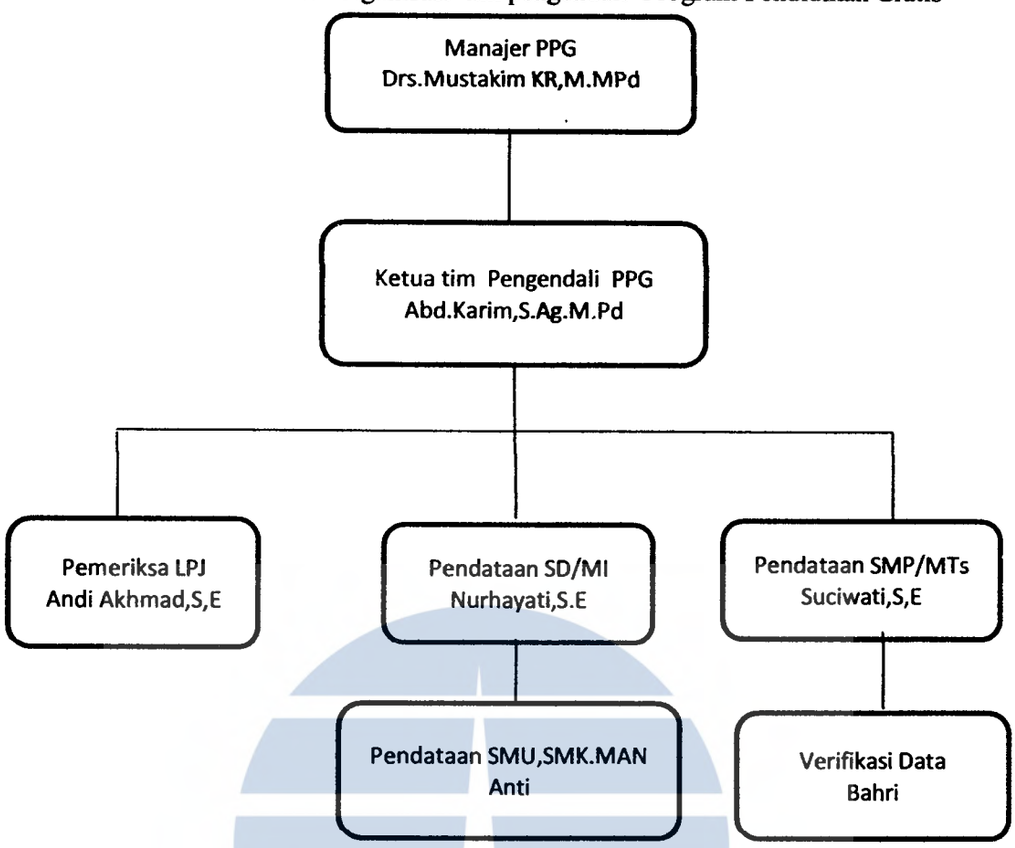

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan

Dari keteranganAbd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bahwa staf implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah Drs.Mustakim KR,M.MPd.Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd,Andi Akhmad,S.E,Nurhayati,S.E,Suciwati,S.E,Anti dan Bahri ,9 September 2013).

Dari keteranganAbd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa yang terjadi dengan adanya struktur organisasi pemisahan tugas opersional; masing-masing staf. .(wawancara,9 September 2013).

Dari keterangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa dengan adanya struktur organisasi sangat bermanfaat bagi tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan (wawancara,9 September 2013).

2). Birokrasi

Birokrasi yang terjadi dalam proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratisoleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyulitkan dan memudahkan (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,9 September 2013).

Dari keterangan Andi Akhmad,S.Pd.SD kepala SDN Parangia dan Daeng Siolakepala SMPN 2 Bontomatene dan Firman kepala MA mengatakan bahwa birokrasi yang terjadi dalam proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh tim pengembang Program

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyulitkan dan memudahkan wawancara,9 September 2013).

II.Pembahasan Penelitian

A.Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar

Payung hukum implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar adalah Peraturan Daerah propinsi Sulawesi Selatan nomor 4 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap kepala sekolah pada semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.Menurut Fadillah (2001: 12), implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Dalam impelementasi kebijakan pendidikan gratis terdapatt tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1.adanya program yang akan dilaksanakan.Program yang menyangkut kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar dinamakan Program Pendidikan Gratis.

2.Adanya target yang harus dicapai.Target yang harus dicapai dalam Program Pendidikan Gratis di kabupaten Kepulauan Selayar adalah membebaskan biaya sekolah anak-anak bagi orangtua siswa yang tingkat ekonominya menengah ke bawah agar mampu bersekolah mulai dari SD sampai SMU baik negeri maupun swasta

3.Unsur pelaksana implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah kepala sekolah pada semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Abdullah (1987:11) menyatakan bahwa dalam proses implementasi, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu;

a.Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan

b.Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut

c.Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sedangkan menurut Dunn (2000:23) mengemukakan bahwa dalam pembuatan kebijakan, agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi.kebijakan berupa penyusunan serta tahapan yang jelas dan transparan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu tahap atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terus terjadi sepanjang waktu, dimana setiap tahap berhubungan dengan berikutnya dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda).

Permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar adalah terdistorsinya hak peserta didik mendapatkan pelayananan pendidikan yang sesuai karakteristik perkembangannya (bakat,minat,dan kompetensinya)

Merujuk dari fakta tersebut di atas, tentu ada factor –faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam pembahasan penelitian ini ada 4 dimensi kebijakan public yang dijadikan referensi untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu di kabupaten Kepulauan Selayar.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

A).Komunikasi

Aspek-aspek yang mendukung adalahkomunikasi meliputi : (a).Alat yang digunakan.dan (b).cara pelaksanaan

Kedua aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut:

1).Alat yang digunakan

Tabel 4.1.Jumlah alat dan kondisi

No.	Nama alat	Jumlah (buah)	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				Berat	Sedang	Ringan
1.	Laptop	1	1			
2.	White board	1	1			
3	LCD	1	1			
4.	Mikropon	2	2			
5.	Sound system	1	2			
6	Listrik	900 Watt	900 Watt			
7	Meja	3	V			
8	Kursi	400	350	20		30
9.	AC	-				

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara denganAbd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa alat – alat yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah laptop 1 buah.white board 1 buah,LCD 1 buah,mikropon 1 buah,sound system 1 buah,listrik 900 watt,meja 3 buah,dan kursi 350 buah dan AC tidak ada..(wawancara ,9 September 2013)

Alat adalah benda- benda.yang dapat membantu optimal tidaknya suatu kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Penggunaan laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik ,meja dan kursi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi implementasi kebijakan pendidikan gratis karena ditinjau dari dua aspek yaitu:1).fungsi.2).manfaat

Kedua aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

(1).Fungsi

Laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik meja dan kursi dapat berfungsi sebagai media komunikasi.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak pihak yang memanfaatkan media untuk berbagai keperluan.Misalnya dalam dunia bisnis ,banyak perusahaan yang menginginkan produknya laku dipasaran.Cara yang dilakukan dengan promosi atau iklan dengan memanfaatkan media.Dalam komunikasi juga menggunakan media agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.Media merupakan saluran komunikasi.Laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik ,meja dan kursi dapat dipertimbang sebagai media jika membawa pesan-pesan (messages)dalam rangka mencapai tujuan komunikasi.

Media terbagi atas dua unsur penting yaitu unsur peralatan atau perangkat keras.(hardware) dan perangkat lunak (softward).

Dalam komunikasi laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik ,meja dan kursi disebut perangkat keras (hardware).Pesan-pesan (messages) yang dibawa laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik ,meja dan kursi disebut software).

(2).Manfaat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Manfaat laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik meja dan kursi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:a).manfaat praktis a).manfaat teoritis.

(a).Manfaat praktis

Manfaat praktis dari laptop,LCD,white board,mikropon,sound system,listrik meja dan kursi adalah sebagai berikut: (a).laptop sebagai alat tempat menyimpan file informasi.(b).LCD sebagai alat untuk mengtranparankan informasi.(c).white board sebagai layar proyektor LCD.(d).mikropon sebagai alat bantu bicara.(e).sound system sebagai alat pengatur volume suara.(f).listrik sebagai alat penerangan dan sumber listrik untuk laptop,LCD,dan sound system.(g).meja sebagai tempat menyimpan Laptop,mikropon,LCD dan lain-lain.(h).kursi sebagai tempat duduk.AC sebagai pendingin ruangan.

(b).Manfaat teoritis

Laptop,white board,mikropon,sound system,listrik meja dan kursi adalah : membantu memperlancar terlaksananya kegiatan implementasi kebijakan pendidikan gratis.

2).Cara pelaksanaan

Pelaksanaan dalam komunikasi implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah cara sosialisasi.(dinas pendidikan kabupaten Kepualauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag..M.Pd mengatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sosialisasi (wawancara,9 September 2013).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sosialisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh factor :1).efisiensi 2) efektivitas

Kedua factor tersebut di atasakan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Efisisiensi

Dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan sosialisasi mempertimbangkan factor efisiensi. Karena efisiensi menyangkut pertimbangan bahwa keberhasilan para pelaksana atau implementer dalam melaksanakan implementasi kebijakanperlu dan harus menggunakan rasionalitas ekonomis.

b).efektivitas

Dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan sosialisasi mempertimbangkan factor efektivitas Karena efektivitas menyangkut pertimbangan bahwa keberhasilan para pelaksana atau implementer dalam melaksanakan implementasi kebijakanperlu dan harus menggunakan rasionalitas waktu

Aspek-aspek yang berkaitan dengan sosialisasi antara lain: a).penyelenggara.b).panitia penyelenggara.c).peserta .d).pemateri.e).materi.f.waktu pelaksanaan .g).anggaran

Ketujuh aspek yang tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a). Penyelenggara sosialisasi

Penyelenggara sosialisasi dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar(data dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Hasil wawancara dari Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa penyelenggara sosialisasi. adalah Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar(wawancara,9 September 2013).

Penyelenggara sosialisasi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.Hal ini karena dipengaruhi oleh dua faktor : a). Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Semua kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan masalah pendidikan diselesaikan di Dinas Pendidikan, seperti pemberantasan buta huruf, penuntasan Wajib belajar sembilan tahun, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan mutu pendidikan. b). segala urusan yang berkaitan dengan pengimplementasian Perdano.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis semuanya diselesaikan di Dinas Pendidikan, seperti pencaiaran dana dan pelaporan pemanfaatan dana pendidikan gratis

b).Panitia Penyelenggara sosialisasi

Panitia penyelenggara sosialisasi adalah semua staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendididkan kabupaten Kepulauan Selayar (data dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 Septemebr 2013).

Hasil wawancara dengan Nurhayati staf tata usaha sub bagan hukum dan perencanaan dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa panitia penyelenggara sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah semua staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendididkan kabupaten Kepulauan Selayar (wawancara,9 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Semua staf sub bagian hukum dan perencanaan dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar menjadi penyelenggara sosialisasi,karena dipengaruhi oleh factor 1).persyaratan 2).legalitas

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).persyaratan

Panitia penyelenggaraadalah orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.Panitia penyelenggara sosialisasi adalah semua pegawai atau staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan sosialisasi. karena semua staf sub bagian hukum dan perencanaan menjadi anggota tim pengendali Program Pendidikan Gratis.Tim pengendali Program Pendidikan Gratis adalah pihak-pihak yang memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis,Mulai dari perencanaan yakni pendataan sekolah penerima anggaran pendidikan gratis,pelaksanaan yaitu penyaluran anggaran pendidikan gratis ke semua satuan dan jenjang pendidikan dan pelaporan yakni pemeriksaan dan penerimaan dokumen pemanfaatan anggaran pendidikan gratis dari semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis.

2).legalitas

Semua pegawai atau staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebagai panitia penyelenggara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis karena semuanya mendapat Surat Keputusan dari kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan panitia penyelenggara sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis terdiri dari :

Ketua panitia :Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd

Bendahara :Nurhayati

Sekretaris :Suciwati

Seksi – seksi

1.Seksi konsumsi : Anti

2.Seksi perlengkapan: Andi Akhmad,S.E

(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Nurhayati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar bahwa susunan panitia

Penyelenggara sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

Ketua panitia :Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd

Bendahara :Nurhayati

Sekretaris :Suciwati

Seksi – seksi

1.Seksi konsumsi : Anti

2.Seksi perlengkapan: Bahri

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Susunan panitia penyelenggara sosialisasi akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

Panitia penyelenggara sosialisasi adalah orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd dtunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh factor:1).Jabatan 2).kompetensi 3).kredibiltas

1).Jabatan

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd adalah kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.

2).kompetensi

Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd adalah ketua tim pengendali Program Pendidikan Gratis.

3.).kredibilitas

Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd karena dipercaya oleh kepala Dinas Pendidikan dan manager Program Pendidikan Gratis mampu mensukseskan pelaksanaan sosialisasi.

Begitu juga dengan panitia penyelenggara lainnya.

c.Tempat sosialisasi

Tempat sosialisasi adalah SMPN 2 Benteng (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil wawancara dengan Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi bertempat di SMPN 2 Benteng.(wawancara,9 September 2013). Kegiatan sosialisasi bertempat di SMPN 2 Benteng karena dipengaruhi oleh factor enamtaitu :a). Letaknya sangat startegis , karena berada di pertengahan antara Selayar bagian utara dan Selayar bagian selatan.. tidak jauh dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. b). memiliki ruangan yang khusus untuk kegiatan sosialisasi. c). memiliki jumlah kursi yang cukup (350 buah) untuk tempat duduk para peserta sosialisasi. d). memiliki daya listrik sebesar 900 Watt. e), memiliki LCD dan white board untuk mengtransparansikan materi sosialisasi .f).memiliki mikropon dan sound system.

87

d),Peserta sosialisasi

Peserta sosialisasi kepala sekolah,bendahara,dan ketua komite sekolah di semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Nurhayati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan bahwa peserta sosialisasi yang diundang meliputi :.,Kepala sekolah ,bendahara anggaran pendidikan gratis dan ketua komite sekolah dari semua satuan dan jenjang pendidikan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.(wawancara,9 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Kepala sekolah diundang sebagai peserta sosialisasi karena dipengaruhi oleh dua factor: 1).jabatan. 2).kredibilitas

Kedua factor yang tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Jabatan

Kepala sekolahbertindak sebagai penangungjawab penuh pemanfaatananggaran pendidikan gratis.

2).kredibilitas

Kepala sekolah dipercaya dapat mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.

Bendahara anggaran pendidikan gratis diundang karena dipengaruhi oleh faktor 1).jabatan.2).kredibilitas

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Jabatan

Bendahara adalah guru yang dipilih oleh kepala sekolah sebagai pelaksana pemanfaatan anggaran pendidikan gratis di sekolah.

3).kredibiltas

Bendahara adalah guru dipercaya dapat mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh kepala sekolah.

Ketua komite sekolah diundang karena dipengaruhi oleh dua factor :1). ketua komite dipandang sebagai tokoh masyarakat yang paling tepat untuk menyampaikan informasi tentang Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaran pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar kepada seluruh lapisan masyarakat 2). ketua komite dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk menjadi sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

pengganti pemateri kepada seluruh lapisan masyarakat,sehingga informasi tersebut benar – benar diketahui dan dipahami masyarakat atau orangtua siswa dengan sebaik – baiknya.

e).Pamateri

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Nurhayati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, mengatakan bahwa pemateri dalam sosialisasi adalah.Drs.Mustakim KR,M.MPd Drs.Mustakim KR,M.MPd ditunjuk sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi karena dipengaruhi oleh factor :1).Jabatan.2).kompetensi.3).kredibilitas

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Jabatan

Drs.Mustakim KR,M.MPd adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

2).Kompetensi

Drs.Mustakim KR,M.MPdkarena, beliau yang bertindak sebagai manajer Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar

3)krediblitas

Drs.Mustakim KR,M.MPdkarena beliaudipercaya mampu mentransmisikan,menjelaskan dan memiliki konsistensi dalam membawakan materi implementasi kebijakan pendidikan gratis

f).Materi sosialisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Materi sosialisasi adalah meliputi : (1).pemanfaatan anggaran (2).Larangan.(3).Sanksi (4).laporan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis (data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Dari wawancara Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Dinas Pendidikan Nasional mengatakan bahwa materi sosialisasi adalah (1).pemanfaatan anggaran (2).Larangan.(3).Sanksi (4).laporan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis (wawncara,9 September 2013). (wawancara,9 September 2013).

Keempat aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis

Anggaran pendidikan gratis dimanfaatkan untuk membiayai 8 Standar Nasional Pendidikan.Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta keberadaan bangsa yang bermartabat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

a).standar isi.b). standar proses c). standar kompetensi lulusan.d). standar pendidik dan tenaga kependidikan.e). standar sarana dan prasarana.f). standar pengelolaan,g). standar pembiayaan.h). standar penilaian pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut:

1).Standar Isi

Standar isi menurut Standar Nasional Pendidikan adalah program tahunan, program semester dan silabus,termasuk pembagian tugas dan jadwal pelajaran.

2).Standar proses

Standar proses menurut Standar Nasional Pendidikan adalah :1).Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar.2).Pengadaan Sarana penunjang KBM (ATK KBM).3).Pengadaan alat pembelajaran (seluruh Mapel termasuk Or) 4).Kegiatan pemantapan materi untuk menghadai ujian 5).Bantuan untuk siswa miskin 6).Pelaksanaan ekstrakurikuler.7) Bantuan pembelian buku, pensil, pulpen, baju seragam, baju olah raga, sepatu, tas dan lain-lain untuk pelaksanaan proses belajar di sekolah bagi siswa miskin.

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis bahwa operasional sekolah dibiayai oleh anggaran pendidikan gratis meliputi :

a).Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

b).Pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c).Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi.

d).pengadaan buku rapor dan foto murid.

3.Standarskompetensi lulusan

Standarskompetensi lulusan menurut Standar Nasional Pendidikan adalah meliputi :a).Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal.b).Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas.c).Pelaksanaan uji coba ujian sekolah di tingkat sekolah,kecamatan atau di tingkat kabupaten.d).dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan.

4).Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Standar Nasional Pendidikan adalah (1).pengembangan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS),pendidikan dan diklat,seminar ,study banding dan workshop.(2).pembayaran insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah (1).Pembiayaan kegiatan pembelajaranremedialdan pengayaan (2).Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 3).pengembangan profesi guru.

5).Standar sarana dan prasarana sekolah

Standar sarana dan prasarana sekolah menurut Standar Nasional Pendidikan adalah meliputi : (1).pengadaan stensil / mesin pengganda,mesin

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ketik,laptop,computer,LCD,dan printer 2)Pemeliharaan dan perbaikan gedung.3).Pengadaan dan perawatan moubilair.4)perbaikan dan perawatan ringan sekolah.

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang berkaitan dengan Standar sarana dan prasarana sekolah adalah (1).pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat rusak ringan.(2).pemasangan jaringan listrik baru jika dibutuhkan.

6).Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan menurut Standar Nasional Pendidikan adalahmeliputi : 1).Kegiatan Manajemen Sekolahterdiri ataspenyusunan Visi dan misi, dan Penyusunan profil sekolah.2). Kegiatan Pengelolaan Perkantoran yang terdiri atas :penyusunan program ketatausahaan, Pengadaan sarana perkantoran,3). Kegiatan supervisi,monitoring,dan evaluasi yang terdiri atas: penyusunan program supervise,monitoring,dan evaluasi supervise akademik dan manajerial,4). Kegiatan hubungan masyarakat yang terdiri atas pengembanagan Sistem Informasi Manajemen dan penyusunan leafet 5). Perbaikan manajemen dan penggandaan LPJ

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang berkaitan dengan Standar pengelolaan bahwaPembiayaan pengelolah Pendidikan Gratis: Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

7.Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan menurut Standar Nasional Pendidikan meliputi :a). Kegiatan Rumah Tangga Sekolah,Daya dan Jasa .

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang berkaitan dengan standar pembiayaan adalah(1).pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.(2).Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah 3).

8.Standar Penilaian

Standar penilaian menurut Standar Nasional Pendidikan meliputi :!).Penyusunan kisi-kisi ujian .2).penyusuan soal –soal ujian 3).Penggandaan soal-soal ujian dan sampul 4). Tindak lanjut hasil penilaian.5).Portofolio.6). Proyek.7). Penugasan.8). Inovasi model penilaian

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang berkaitan dengan standar penilaian adalahPembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

2).Larangan

Materi sosialisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah menyangkut larangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh factor : 1).Program tepat sasaran .2).Program mencapai tujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Program tepat sasaran

Setiap program selalu mengharapkan agar tepat sasaran.Untuk mencapai harapan itu,maka setiap pemberi kebijakan dalam program selalu terpanggil untuk melaksanakan sosialisasi.Materi sosialisasi Implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah larangan yakni larangan bagi satuan pendidikan untuk memungut biaya dari orang tua peserta didik.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab IV larangan pasal 9ayat 1 bahwa kepala sekolah dan atau guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orangtua peserta didik.Pasal 10 bahwa jenis-jenis pungutan yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah sebagai berikut :(a). permintaan bantuan pembangunan. (b). permintaan bantuan dengan alasan dana sharing. (c). pembayaran buku. (d). pembayaran iuran pramuka, (e). pembayaran LKS. (f). pembayaran uang perpisahan. (g). pembayaran uang foto. (h). pembayaran uang ujian. (i). pembayaran uang pengayaan. (j). pembayaran uang rapor. (k). pembayaran uang penulisan ijazah. (l). pembayaran uang infaq. (m). pungutan lainnya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.

Dengan adanya larangan seperti tersebut di atas,makaimplementasi kebijakan pendidikan gratis akan tepat sasaran.Sasaran implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah peserta didik yang orangtua tuanya kurang mampu atau tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat sampai SMU sederajat baik negeri maupun swasta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab II bahwa pendidikan gratis berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

2) Program Pendidikan gratis mencapai tujuan

Suatu program pasti ada tujuan yang hendak dicapai.Untuk mencapai tujuan tersebut para pemberi kebijakan selalu terpanggil untuk melaksanakan sosialisasi.Materi sosilisasi implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah pemanfaatan anggaran karena dengan memahami.maka tujuan program pendidikan gratis tercapai.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab II bahwa pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat,peserta didik,atau orangtua peserta didik

3).Sanksi

Sanksi adalah hukuman akan diterima oleh pelaksana kebijakan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.Sanksi dijadikan materi sosialisasi karena dipengaruhi oleh factor:1).pelaksana kebijakan taat hukum yang berlaku 2).pelaksana kebijakan memahami sanksi jika melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penddikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar bahwa sanksi yang diterima oleh pelaksana kebijakan jika melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut :1).sanksi adminiatrasi.2).sanksi hukuman.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kedua sanksi akan dibahas lebih lanjut:

1).Sanksi administrasi

Sanksi administrasi adalah hukuman yang diterima oleh pelaksana kebijakan yang melakukan pungutan.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penddikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar Bab VII pasal 14 bahwa kepala sekolah dan atau guru yang melakukan pungutan akan dberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2).Sanksi pidana

` Sanksi pidana adalah hukuman yang diterima oleh pelaksana kebijakan yang melakukan pelanggaran dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penddikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar Bab IX pasal 16 bahwa bagi kepala sekolah dan atau guru yang melanggar ketentuan pasal 9 yakni melakukan pungutan dalam bentuk apapupun dan sekecil apapun kepada peserta didik atau orangtua peserta didik dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4).Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis adalah doukumen yang berisi data-data tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepala sekolah atau bendahara yang disetor satu kali dalam setiap tiga bulan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

kepada Dinas pendidikan kebupaten Kepulauan Selayar melalui tim pengendali program pendidikan gratis.

Kepala sekolah atau bendahara menyetor laporanpertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratissatu kali dalam setiap tiga bulan kepada Dinas pendidikan kebupaten Kepulauan Selayar karena tahapan penarikan tunai anggaran pendidikan gratis terbagi atas 4 tahapan yakni tahap 1,2,3,dan 4

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis bahwa tahapan pencairan anggaran pendidikan gratis oleh kepala sekolah atau bendahara terbagi atas 4 tahapan yakni:

a).Tahap I periode Januari – Maret

b).Tahap II periode April – Juni

c.Tahap III periode Juli – September

d.Tahap IV periode Oktober - Desember

g).Pelaksanaan sosialisasi

1).Teknis Pelaksanaan

Sosialisasi dibagi atas tiga tahap:

a).Tahap pertama : Sekolah Dasar / MI atau sederajat negeri dan swasta

b).Tahap kedua : SMP / MI sederat negeri dan swasta

c).Tahap ketiga : SMU ,SMK , MA sederajat negeri dan swasta

(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

hasil wawancara dengan Suciwati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa pelaksanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sosialisasi dibagi atas tiga tahap yaitu :1).tahap pertama : SD / MI atau sederajatnegeri dan swasta.2).tahap kedua : SMP / MI sederat negeri dan swasta.3).tahap ketiga : SMU ,SMK , MA sederajat negeri dan swasta.(wawancara,9 Septemebr 2013).Bertahapnya pelaksanaan sosialisasi karena dipengaruhi oleh factor 1).jumlah peserta sosialisasi tidak dapat ditampung dalam satu ruangan.2).memudahkan dalam memonitoring peserta yang hadir dan tidak yang hadir.

2).Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sosialisasi Sabtu,20 Januari 2013,SMP / MTs dan sederajat negeri dan swasta Senin 22 Januari 2013,SMU.SMK.MAN Selasa,23 Januari 2013 setiap tahun anggaran.(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancaradengan Suciwati staf tata usaha sub bagian Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa waktu pelaksanaan sosialisasi untuk jenjang SD / MI dan sederajat baik negeri yakni Sabtu,20 Januari 2013,SMP / MTs dan sederajat negeri dan swasta Senin 22 Januari 2013,SMU.SMK.MAN Selasa,23 Januari 2013 setiap tahun anggaran (wawancara,9 September 2013).

Waktu pelaksanaan sosialisasi untuk jenjang SD / MI dan sederajat baik negeri yakni Sabtu,20 Januari 2013, karena dipengaruhi oleh factor :1).Pada hari Sabtu guru yang ditunjuk kepala sekolah sebagai bendahara hanya mengajar 2 jam pelajaran,2). guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam 3 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran hari buku.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Waktu pelaksanaan sosialisasi untuk jenjang SMP / MTs dan sederajat negeri dan swasta Senin 22 Januari 2013,karena dipengaruhi oleh factor guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai bendahara adalah guru mata pelajaran yang tidak mempunyai jam mengajar pada hari itu ,Begitu juga denganSMU.SMK.MAN Selasa,23 Januari 2013 guru yang ditunjuk kepala sekolah sebagai bendahara adalah guru mata pelajaran yang mempunyai jam mengajar pada hari itu.

90

Waktu pelaksanaan sosialisasi disesuaikan dengan tahun anggaran karena dipengaruhi oleh factor kejelasan informasi yakni dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi setiap tahun anggaran para penanggungjawab dan pelaksana anggaranpendidikan gratis di semua satuan dan jenjang pendidikan akan semakin mengetahui dan memahami apa yang seharusnya dilaksanakan dan seharusnya tidak dilakukan. kebijakan agar pengimplementasiannya berjalan sebagaimana yang diinginkan

3).Lamanya sosialisasi

Lamanya sosialisasi sosialisasi kadang berlangsung kadang 4 jam dimulai pukul 08.00 – 12.00 Wita dan kadang 6 jam.dimulai pukul 08.00 – 16.00.Wita Istrahat ,sholat dan makan 2 jam yakni mulai pukul 13.00 – 15..00 Wita(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancara dari Suciwati staf tata usaha sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwasosialisasi kadang berlangsung kadang 4 jam dimulai pukul 08.00 – 12.00 Wita dan kadang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6 jam.dimulai pukul 08.00 – 16.00.Wita Istrahat ,sholat dan makan 2 jam yakni mulai pukul 13.00 – 15..00 Wita(wawancara,9 September 2013)

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung kadang 4 jam dimulai pukul 08.00 – 12.00 Wita dan kadang 6 jam.dimulai pukul 08.00 – 16.00.Wita Istrahat ,sholat dan makan 2 jam yakni mulai pukul 13.00 – 15..00 Wita tergantung dari padat tidaknya materi sosialisasi.Berlangsung selama 4 jam jika materinya kurang padat.Berlangsung selama 6 jam jika materi padat.

f.Anggaran sosialisasi

Anggaran sosialisasi adalahRp 5.000.000 sampai Rp 7.000.000.bahkan lebih.

(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Nurhayati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwaanggaran sosialisasi disesuaikan dengan kondisi kadang Rp 5.000.000 kadang Rp 7.000.000.bahkan lebih.

Anggaran sosialisasi disesuaikan dengan kondisi kadang Rp 5.000.000 kadang Rp 7.000.000.bahkan lebih.karena dipengaruhi oleh factor :1).disesuaikan dengan banyak sedikitnya peserta sosialisasi 2).pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi tiga tahapan.

Anggaran sosialisasi dipersipakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Nurhayati staf sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa biaya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

pelaksanaan sosialisasi dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar(wawancara,9 September 2013).

DinasDinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. yang mempersiapkan anggaran sosialisasi karena sudah dimasukkan dalam DIPA Dinas Pendidikan setiap tahun anggaran.Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar memasukkan anggaran sosialisasi dalam DIPA Dinas Pendidikan setiap tahun anggaran,karena dipengaruhi oleh dua faktor : pertama, kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan gratis ini merupakan program andalan Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.Kedua, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi setiap tahun anggaran para kepala sekolah dan bendahara di setiap satuan dan jenjang pendidikan,informasi yang diperoleh akan semakin jelas

Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan.

1) Transmisi, yaitu proses penyampaian informasi.Implementasi

Transmisi Implementasi kebijakan pendidikan gratis yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar berjalan kurang optimal karena dipengaruhi oleh factor : 1).peserta merasa kepanasan dalam ruangan karena tidak ada AC.2).suasana dalam ruangan terlalu gaduh.3).peserta mengantuk karena pemateri terlalu serius dalam memaparkan materinya.

2).Kejelasan informasi,Kejelasan informasi yaitu petunjuk pelaksanaan dari implementasikebijakan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan di lapangan.Petunjuk pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan yang disampaikan oleh pemberi kebijakan dalam kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sosialisasitidak jelas.

Ketidakjelasan informasi karena dipengaruhi oleh factor: 1).pemateri.terlalu cepat dalam memaparkan materinya.2).listrik sering padam.3)..suasana dalam ruangan terlalu panas karena tidak ada AC.

3).Konsistensi informasi

Konsistensi informasi adalah petunjuk sutau kebijakan tidak berubah-ubah Petunjuk pelaksanaanimplementasi kebijakan pendidikan seringkali berubah-ubah karena dipengaruhi oleh factor : 1).pemateritidak selamanya berada pada tempat yang vakum 2).pemateri selalu berhadapan dengan banyak pihak yang berkepentingan.3).situasi politik yang semakin memanas.4).Pematei hanyalah manusia biasa.yang tidak luput kekhilafan

Menurut Edward (dalam Nawawi .2007) mengatakan bahwa komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masayarakat. Ada tiga unsur yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

2) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberap tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

3) Kejelasan informasi, yaitu petunjuk pelaksanaan dari sebuah kebijakan harus jelas agar pengimplementasiannya berjalan sebagaimana yang diinginkan.

4) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, perintah tersebut tidak bertentangan sehingga dapat memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2.Sumber Daya

Aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya dalam implementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar adalah meliputi :1).staf.2 anggaran.3.fasilitas

Ketiga aspek tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut di bawah ini:

a.Staf

1).Jumlah staf

Staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis berjumlah 7orang(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancara dengan Drs.Mustakim KR,M.MPd sekretaris Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa berjumlah 7 orang(wawancara,9 September 2013).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah pihak-pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam suatu organisasi demi suksesnya Program Pendidikan Gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.

Yang menjadi staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis berjumlah 7 orang karena ditinjau dari aspek: 1).makna angka 7 (tujuh) 2).kuorum

Kedua aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di abwah ini:

1.Makna angka 7 (tujuh)

Banyak sekali makna angka 7 (tujuh) dalam kehidupan sehari-hari.Ada yang bermakna bahwa cahaya matahari terdiri atas 7 warna yang dikenal dengan spectrum warna.yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.Adayang bermakna 7 keajaiban dunia Kaitannya angka 7 (tujuh) dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah agar implementasi kebijakan pendidikan gratis mencapai tujuan yang diharapkan.

2).Kuorum

Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapatKuorumberkaitan erat dengan pengambilan keputusan..Staf implementasi kebijakan pendidikan gratis berjumlah 7 orang agar dalam pengambilan keputusan terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan dapat mencapai kuorum yakni 50 % tambah satu.

2).Nama staf

Nama staf implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah tim pengendali Program Pendidikan Gratis (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,3 September 2013)..

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd mengatakan bahwa .staf dalam Program Pendidikan Gratis dinamakan tim pengendali Program Pendidikan Gratis(wawancara,9 September 2013).

Staf dalam Program Pendidikan Gratis dinamakan tim pengendali Program Pendidikan Gratis. karena nama tersebut hanyalah berfungsi pembeda dari nama program pendidikan lainnya seperti Program Anak Usia Dini (PAUD) dan Program Pemberantasan Buta Aksara yang ditkelola oleh Bidang Pendidikan Non Formal.

3.Susunan tim pengendali Program Pendidikan Gratis atau staf

Susunan staf implementasi kebijakan pendidikan gratis adalahsusunan tim pengendali Program Pendidikan Gratis di kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas manager Program Pendidikan Gratis, ketua tim pengendali Program pendidikan Gratis dan anggota(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.M.Pd mengatakan bahwa susunan tim pengendali Program Pendidikan Gratis di kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atasmanager Program Pendidikan Gratis, ketua tim pengendali Program pendidikan Gratis dan anggota.wawancara,9 September 2013).

Susunan tim pengendali Program Pendidikan Gratis di kabupaten Kepulauan Selayar hanya terdiri atas : manajer Program Pendidikan Gratis, ketua dan anggotatim pengendali Program Pendidikan Gratis .karena dipengaruhi faktor :1).Program Pendidikan Gratis merupakan program unggulan 2).bila susunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

timProgram Pendidikan Gratis terlalu gemuk ,akan membutuhkan biaya insentif yang besar.

4.Kompetensi dan skill tim pengendali Program Pendidikan Gratis atau staf

Tim pengendali Program Pendidikan Gratis memiliki kompetensi dan skill yang memadai (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Drs.Mustakim KR,M.MPd yang diwakili oleh Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis memiliki kompetensi dan skill yang memadai.(wawancara,9 September 2013).

Staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis ditinjau dari sisi kompetensi cukup memadai karena dipengaruhi factor :1).sudah memenuhi standar kualifikasi yakniterdiri dari 2 orang yang berijazah S2,3 orang berijazah S1 dan 2 orang yang berijazah SMA dan yang berijazah SMA semestara menempuh perkuliahan di Universitas Terbuka.

Staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis ada dua orang mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka .karena mereka menyadari bahwa : 1).menuntut ilmu itu adalah ibadah.2).dengan menuntut ilmu semakin banyak yang tidak diketahui,justru itu ingin belajar sepanjang hidup (long live education).seseorang terangkat derajatnya disisi manusia dan Allah SWT karena dengan ilmu.3).ilmu dapat merubah tarap hidup seseorang ke arah yang lebih baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Staf tim pengendali Program Pendidikan Gratis jika ditinjau dari sisi skill karena dipengaruhi oleh factor 12).telah pernah mengikuti pendidikan dan latihan 3). dan ketujuhnya telah terampil mengoperasikan laptop atau computer.khususnya dalam membuat aplikasi data..

.Menurut Edward III (dalam Nawawi, 2007) mengatakan bahwasalah satu unsur penting dalam sumber daya (*resources*)agar implementasi kebijakan menjadi efektif adalah staf yang memiliki kompetensi dan skill yang memadai,agar perintah-perintah implementasi dapat diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten.

b.Anggaran

1.Sumber anggaran

Anggaran pendidikan gratis bersumber dari Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara denganAbd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwaanggaran pendidikan gratis bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar(wawancara .9 September 2013).

Anggaran pendidikan gratis bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar,karena dipengaruhi oleh factor : (a). refleksi politik (b).sosial budaya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di abwah ini:

a).Refleksi Politik

Setiap pemilihan baik pemilihan presiden,gubernur,bupati atau walikota pada saat berkampanye berbagai janji yang diungkapkan kepada para audiens seperti jika terpilih nanti akan memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat berupa kesehatan gratis,pendidikan gratis,Kartu Jakarta Pintar,Kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain .Pengungkapan janji-janji tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh para calon dalam memenangkan pemilihan.Keberadaan anggaran pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar merupakan refleksi politik gubernur yang terpilih Syahrul Yasin Limpo dan Syahril Wahab tahap pertama pencalonan dirinya sebagai gubernur Sulawesi Selatan dan bupati kabupaten Kepulauan Selayar

b).Sosial budaya

. Mata pencaharian masyarakat kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya petani penggarap.yang berpindah-pindah (ekstensipikasi)dengan tingkat ekonomi golongan menengah ke bawah. Kebijakan pendidikan gratis ,membawa angin segar bagi masyarakat dan / atau orangtua siswa yang kurang dan tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya dari SD sampai SMU atau sederajat.

2.Jumlah anggaran

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00 dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00 dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00 (wawancara,9 September 2013).

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00.ditinjau dari 3 aspek yaiti : (1).Hak Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan mutu pendidikan.di kabupaten Kepulauan Selayar. 2). kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar.3).Hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

1).Hak Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan bantuan layanan pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00.adalahhak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membantu masyarakat dan / atau orangtua siswa yang kurang atau tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya.Jaminan tersebut terdapat dalam Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.pada Bab III hak dan kewajiban bagian kesatu pasal 5 bahwa Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing,membantu,mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis.

2).Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar.

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Anggaran sebagaimana tersebut di atas,merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan layanan dana kepada masyarakat ,peserta didik atau orangtua peserta didik yang kurang atau tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya.Kewajiban tersebut terdapat dalam Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.pada Bab III Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah pasal 5 ayat 1 bahwa.Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.(2)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis

3).Hak Peserta didik untuk mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu.

Anggaran pendidikan gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , tahun anggaran 2013 berjumlah sebesar Rp 102.270.502.500,00dengan rincian sebagai berikut:1) SD 139 buah, MIN / MIS 14 buah, SDLB 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 5.348.152.500,00. 2). SMP 50 buah, SMPLB 1 buah, MTs 12 buah dengan total anggaran sebesar Rp 4.047.174.000,00, 3).SMU 9 buah, SMK 7 buah, MA 1 buah dengan total anggaran sebesar Rp 2.875.176.000,00.

Anggaran sebagaimana tersebut di atas merupakan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu,sesuai dengan karakteristik perkembangannya..Hak tersebut terdapat dalam Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.pada Bab III Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah bagian ketiga hak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan kewajiban peserta didik pasal 8 ayat b bahwa.setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : .mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan karakteristik perkembangannya(bakat,minat dan kemampuannya). Dengan kata lain layanan pendidikan yang bermutu.

Banyak pendapat para ahli yang dapat dijadikan referensi dalam memahami arti kata mutu.Rini ,2011 : 81 mengatakan bahwa mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.

Mutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli.Menurut Sallis ,2006 : 52 mengatakan bahwa mutu dapat digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki "mutu" akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan gratis ,mutu yang dimaksud adalah mutu pendidikan yaitu gambaran yang diperolah dari hasil belajar peserta didik..

Untuk memperoleh gambaran hasil belajar peserta didik perlu diupayakan sebuah strategi peneingkatan mutu pendidikan .Menurut Fattah, 2009:90 mengatakan bahwaupaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaraan akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga professional kependidikan dapat disediakan di sekolah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan diIndonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

a).standar isi.b). standar proses c). standar kompetensi lulusan.d). standar pendidik dan tenaga kependidikan.e). standar sarana dan prasarana.f). standar pengelolaan,g). standar pembiayaan.h). standar penilaian pendidikan.

John Bishop, dlm Nurkolis, 2003: 78-79. Mengemukakah bahwakualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti 1) meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile), 2) membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning), 3) menciptakan kesempatan belajar barn di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur, 4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, 5) membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayatr hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan

Sedangkan menurutEdwar Deming, Paine, dick tahun 1982 (dalam Daniel Kambey, 2004:34-45;Suryosubroto, 2004:198) mengatakan bahwa .kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus di mana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan masakini dan di masa mendatang

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaran pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar pada Bab II pasal 4 bahwa pendidikan gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat,peserta didik atau orangtua peserta didik.

3.Pemanfaatan anggaran

Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk :1).standar isi.2).standar proses.3).standar kompetensi lulusan .4).standar pendidik dan tenaga kependidikan.5).standar sarana dan prasarana sekolah.6).standar pengelolaan.7).standar pembiayaan.8).standar penilaian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Menurut Peraturan bupati nomor.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis dijelaskan bahwa pembiayaan delapan estándar nacional pendidikan terdiri atas 60 % daridari Pemerintah Daerah propinsi Sulawasi Selatan adalah dimanfaatkan untuk membiayai insentif dan 40 % dari Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai operasional sekolah.

Anggaran sebesar Rp 102.270.502.500,00 terdiri dari 60 % dari Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan 40 % dari Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar .merupakan pembagian secara proporsional dari rekleksi dari janji politiknya antara Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar.Pembagian secara prorsional artinya pembagian yang sebanding antara Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembagian secara proporsional antara Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan gubernur terpilih Sulawesi Selatan Syahrul yasin Limpo dan dengan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar bupati terpilih Syahril Wahab ditinjau dari 3 aspek yaitu : (1).nilai kebersamaan .(2).adanya persamaan hak warga negara ,(3). Demokratis keadilan

Ketiga aspek tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a).Nilai kebersamaan

.Anggaran 60 % Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan 40 % Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar merupakan nilai kebersamaan antara Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam membangun kabupaten Kepulauan Selayar

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

di bidang pendidikan.Nilai kebersamaan ini merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 31 : 4 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya .Selanjutnya Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan. Ada dua hal khusus yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan yang pertamamenetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD,

(b).Adanya persamaan hak warga negara

Peserta didik adalah warga Negara Indonesia .Anggaran 60 % Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan 40 % Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar merupakan layanan Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan cerminan adanya persamaan hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Bab IV Bagian kesatu menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 5 ayat 1 menyebutkan " Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.Masih di Bab yang sama ,pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

bagian keempat ihwal hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah Daerah,pasal 11 (1) berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Dalam perspektif pembangunan daerah dewasa ini,seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah dituntut agar mampu mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri yang ditandai dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam menyikapi kewenangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah pendidikan gratis dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar

(c).Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan keadilan

Anggaran 60 % Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan 40 % Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar mencerminkan penyelenggaran pendiidikan yang demokratis dan keadilan.Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis artinya bersifat demokrasi.Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.Keadilan artinya pelakuan yang adil.

Dalam Bab III prinsip dan penyelenggaraan pendidikan pasal 4 UU no.20 tahun2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan pendidikandiselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Merujuk dari dari UU no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nacional di atas dapat dikatakan bahwa untuk terselenggaranya pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif,maka pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.Salah satu unsur penunjang yang dapat menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan adalah memberikan insentif.

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis bahwa anggaran pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan sebesar 60 % dimanfaatkan pembiayaan kegiatan remedial pembelajaran dan pengayaan,insentif tenaga pendidik dan:dan tenaga kependidikan lainnya.dalam bentuk yakni :1).Jam mengajar pendidik.2).tenaga kependidikan.3).remedial pembelajaran.

Ketiga jenis insentif tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut::

1).Jam mengajar.

Insentif jam mengajar adalah tambahan penghasilan atau upah di luar gaji pokok yang diterima oleh tenaga pendidik yang benar-benar melaksanakan tugas.

Insentif jam mengajar yang diterima tenaga pendidik berbeda-beda, bentuk insentif seperti ini disebut insentif pengupahan,artinya insentif yang diterima dihitung berdasarkan jumlah jam / minggu Melalui implementasi kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar mencoba

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik , sehingga dapat memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi penghargaan.Pembiayaaninsentif pendidik berupa pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayan lainnya,sehingga merupakan tambahan penghasilan yang diterima pendidik dan tenaga kependidikan di luar gaji pokok.

. Insentif yang diterima pendidik dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar merupakanprogram pengupahan secara spesifik digunakan untuk memperkuat, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan . Sifat pemberian insentif itu adalah : Pertama sebagai penghargaan atas jabatan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Kedua, sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas yang dikerjakannya.Insentif ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam meringankan dan menyelesaikan persoalan hidup yang dijalani baik yang menyangkut persoalan pribadi maupun persoalan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas di sekolah. Yang menyangkut persoalan pribadi antara lain dapat digunakan untuk alasan dan atau melunasi utang, melunasi cicilan bulanan,menutupi kebutuhan yang mendadak / tidak disangka-sangka. Sedangkan yang menyangkut persoalan pelaksanaan tugas-tugas di sekolah antara lain : dengan adanya insentif dana pendidikan gratis, dulunya sering datang terlambat ke sekolah, sekarang sudah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

datang tepat waktu, dulunya malas mengajar / bekerja, sekarang rajin dan tekun mengajar / bekerja.Di samping itu,insentif yang diterima pendidik dan tenaga kependidikan merupaka upah waktu, maksudnya upah yang ditarik berdasarkan tarif bulanan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222 / III /2013 tentang penetapan alokasi anggaran dana pendidikan gratis di kabupatenKepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013 bahwa besarnya insentif jam mengajar yang diterima oleh pendidik yang aktif melaksanakan tugas mengajar dalam satu bulan, sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran pada setiap satuan dan jenjang pendidikan.Besarnya jam mengajar dibayarkan melalui anggaran pendidikan gratis selama 3 bulan adalah 1387,5 jam.Besarnya insentif yang diterima adalah sebesar Rp 2.500./jam / rombel.Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis insentif diterima satu kali selama 3 bulan adalah 1387,5 jam x Rp 2.500,00 / jam / rombel. Cara perhitungan jumlah jam mengajar yang dibayarkan kepada seorang tenaga pendidik melalui bantuan dana pendidikan gratis perbulannya adalah sebagai berikut : 5 jam selama 27 hari kerja perbulan atau rata-rata 81 hari plus 2 hari atau 145 jam dikali banyaknya rombongan belajar pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. Jadi jumlah jam mengajar yang dibayarkan perbulannya adalah Rp 2.500,00 x 145 jam sama dengan Rp 362.500,00 / bulan ,atau Rp 2.500 x 5 jam x 27 hari plus 2 x rombel sama dengan Rp 362.500,00 / bulan. Perhitungan ini berlaku untuk sekolah yang memiliki enam rombongan belajar.Begitu juga dengan perhitungan bagi SD yang lebih dari enam rombel. Sedangkan pembagian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

insentif jam mengajar bagi guru mata pelajaran adalah jumlah jam mengajar 145 jam / bulan / rombel dikurangi dengan jumlah jam mengajar guru mata pelajaran. Contoh, Si A mengajar di kelas I, jumlah jam mengajar dalam adalah 145 jam. Guru mata pelajaran yang mengajar di kelasnya adalah guru pendidikan agama Islam dan guru penjasorkes. Jumlah jam guru pendidikan agama adalah 3 jam / minggu sama dengan 9 jam / bulan dan guru Penjasorkes 2 jam / minggu sama dengan 6 jam / bulan,maka jumlah jam mengajar guru kelas I adalah 145 jam dikurang 9 jam dikurangi lagi 6 jam sama dengan 130 jam / bulan. Jadi insentif yang diterima guru kelas Si A jika dihitung secara matematika adalah Rp 2.500,00 dikali 130 jam sama dengan Rp 325.000 / bulan belum termasuk PPh. Pasal 21. Untuk guru Pendidikan Agama Islam, insentif yang diterima adalah 9 jam dikali Rp 2.500,00 sama dengan Rp 22.500,00 / bulan,belum potong pajak dan untuk guru Penjasorkes, insentif yang diterima adalah Rp 2.500,00 dikali 6 jam sama dengan Rp 15.000,00 / bulan belum potong pajak.Insentif jam mengajar ini diberikan kepada pendidik yang benar-benar melaksanakan tugas.

112

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar bahwaketentuan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 / PMK.03 / 2010 tentang pengumutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran insentif, maka bagi PNS yang golongan tiga, jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 5 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Apabila tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan(PPh.Ps.21) sebesar 6 % dari besarnya penghasilan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

diterima. Bagi PNS yang golongan empat ke atas, jika memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan (PPh.Ps.21) sebesar 15 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Dan bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 18 % dari besarnya penghasilan yang diterima. Bagi PNS masih golongan dua tidak dikenakan pajak penghasilan

.2).Insentif tenaga kependidikan.

Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diterima oleh tenaga kependidikan yang benar-benar melaksanakan tugas.

Petunjuk Teknis pembayaran insentif tenaga kependidikan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222 / III /2013 tentang penetapan alokasi anggaran dana pendidikan gratis di kabupatenKepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013 sebagai berikut:

pembiayaan insentif tenaga kependidikan sebagai berikut :(1) Kepala Sekolah Rp 125.000,00 / orang / bulan.(2). Wakil Kepala Sekolah Rp 100.000,00 / orang / bulan .(3). Kepala urusan Rp 100.000,00 / orang / bulan. (4). Wali Kelas Rp 100.000,00 / orang / bulan. (5). Guru BP / BK Rp 100.000,00 / orang / bulan. (6). Pustakawan Rp 100.000,00 / orang / bulan. (7). Laboran Rp 100.000,00 / orang / bulan. (8). Bendahara program Rp 100.000,00 / orang / bulan. (9). Kepala tata usaha Rp 75.000,00 / orang / bulan. (10) Bujang Sekolah Rp 75.000,00 / orang / bulan. (11). Satpam Rp 250.000,00 / orang / bulan

Contoh perhiitungan insentif tenaga kependidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Seorang kepala sekolah golongan IV bertugas selama 3 bulan ,maka insentif yang diterima adalah 3 x Rp 125.000,- = Rp 375.000,- belum termasuk PPh.Ps.21.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar bahwaketentuan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 / PMK.03 / 2010 tentang pengumutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran insentif, maka bagi PNS yang golongan tiga, jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 5 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Apabila tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan(PPh.Ps.21) sebesar 6 % dari besarnya penghasilan yang diterima. Bagi PNS yang golongan empat ke atas, jika memiliki NPWP dikenakan 114
pajak penghasilan (PPh.Ps.21) sebesar 15 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Dan bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 18 % dari besarnya penghasilan yang diterima. Bagi PNS masih golongan dua tidak dikenakan pajak penghasilan

Potongan PPh.Ps 21 adalah RP 375.000 x 15 % = Rp 43.250.00

Insentif yang diterima kepala sekolah selama 3 bulan adalah sebesar Rp 375.000- Rp 43,250,- = Rp 331.750,-

3).Insenti remedial pembelajaran

Insentif remedial pembelajaran adalah tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik yang melaksanakan tugas remedial pembelajaran di luar gaji pokok Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis, insentif remedial pembelajaran hanya diperuntukkan bagi guru kelas di Sekolah Dasar dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

guru mata pelajaran selain mata pelajaran Pendidikan Agama dan Olahraga di SMP. atau sederajat dan di SMU,SMK atau deserajat dan MA baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222 / III /2013 tentang penetapan alokasi anggaran dana pendidikan gratis di kabupatenKepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013 bahwa perhitungan insentif remedial pembelajaran guru kelas yang diterima dalam satu rombongan belajar adalah Rp 5.000,00 dikali 6 jam dikali 3 hari dikali rombel dikali semester. Jadi bila dihitung secara matematika hasil adalah Rp 5.000,00 dikali 6 jam dikali 3 hari sama dengan Rp 90.000,00 / bulan, belum potong pajak

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar bahwaketentuan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 / PMK.03 / 2010 tentang pengumutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran insentif, maka bagi PNS yang golongan tiga, jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 5 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Apabila tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan(PPh.Ps.21) sebesar 6 % dari besarnya penghasilan yang diterima. Bagi PNS yang golongan empat ke atas, jika memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan (PPh.Ps.21) sebesar 15 % dari besarnya penghasilan yang diterima.Dan bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak penghasilan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

pasal 21 (PPh.Ps.21) sebesar 18 % dari besarnya penghasilan yang diterima. Bagi PNS masih golongan dua tidak dikenakan pajak penghasilan

Contoh perhitungan:

Seorang guru kelas VI golongan III telah melaksanakan remedial pembelajaran.Insentif remedial pembelajaran yang akan diterima adalah 18 jam x Rp 5.000,- = Rp 90.000 belum termasuk PPh.Ps.21.Potongan PPh.Ps.21 sebesar 5 %.

Insentif remedial pembelajaran = 5 % x Rp 90.000,- =Rp4.500,-

Jadi insentif remedial pembelajaran yang diterima untuk tiga bulan adalah sebesar Rp 85.600,-.

Menurut Peraturan Bupati nomor 222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis bahwa anggaran pendidikan gratis yng bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional sekolah.Lebih lanjut dalam Perbup diatur bahwaanggaran operasional sekolah untuk siswa SD/MI atau sederajat sebesar Rp 4.000 / siswa / bulan dan untuk siswa SMP sederajat dan SMU atau sederajat baik negeri maupun swasta sebesar Rp 17.000,/siswa / bulan

Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis siswa SD/MI atau sederajat sebesar Rp 4.000 / siswa / bulan dan untuk siswa SMP sederajat dan SMU atau sederajat baik negeri maupun swasta sebesar Rp 17.000,/siswa / bulan untuk biaya operasionalkarena dipengaruhi oleh factor: 1). adanya anggaran BOS..2).perhatian Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar belum berpusat pada peningkatan mutu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kedua perkiraaan tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Adanya anggaran BOS..

Anggaran Bantuan Opersional Sekolah adalah bantuan yang dialokasikan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaran operasional sekolah.

Menurut Peraturan Bupati no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 40 % dialokasikan untuk biaya operasional yang tidak dianggarkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2).Perhatian Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar belum berpusat pada peningkatan mutu

Anggaran pendidikan sebesar 20 % yang diamanatkan oleh undang-undang bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan. tetapi dmanfaatkan untuk biaya sharing pembangunan ruang kelas baru,penambahan gedung sekolah baru,biaya pendidikan dan latihan,biaya seminar,biaya workshop dan lain-lain.

Ditinjau dari sisi perbedaan antara biaya operasional sekolah untuk SD / MI dengan SMP atau SMU dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis sudah terjadi diskriminasi terhadap pemenuhan hak peserta didik siswa SD / MI dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat,minat,dan kompetensinya).

Anggaran pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang karena dipengaruhi oleh factor :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1.hanya dapat membiayai tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses,standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan.2).kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan belum berpihak peningkatam mutu pendidikan.3).Belum ada langkah(terobosan) nyata dari Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar terhadap peningkatan mutu pendidikan sehingga hanya sekedar menjadi materi seminar pendidikan dan perdebatan dikalangan para praktisi pendidikan

Ketiga factor tersebut di atas akan diuraikan lbih lanjut dibawah ini:

1).Anggaran pendidikan gratishanya dapat membiayai tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses,standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan

Pemanfaatan anggaran pendidikan gratis hanya dapat membiayai tiga Standar Nasional Pendidikan antara lain:

a).Standar Proses

Menurut Peraturan bupati no.222 tahun 2013 bahwa anggaran pendidikan gratis yang dapat dibiayai untuk standar proses adalah bantuan siswa miskin berupa buku tulis,pulpen,dan pakaian olahraga.

b).Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Menurut Peraturan bupati no.222 tahun 2013 bahwa anggaran pendidikan gratis yang dapat dibiiayai untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah insentif

c).Standar pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Menurut Peraturan bupati no.222 tahun 2013 bahwa anggaran pendidikan gratis yang dapat dibiiayai untuk standar pengelolaan adalah biaya perbaikan manajemen dan penggandaan LPJ dan surat menyurat

2).kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan belum berpihak kepada peningkatam mutu pendidikan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan belum berpihak kepada peningkatan mutu pendidikan hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan berdasarkan Peraturan bupati no.222 tahun 2013 bahwa anggaran untuk SD / MI sebesar Rp 4.000 / siswa / bulan dan untuk siswa SMP dan SMU sederajat sebesar Rp 17.000/ siswa / bulan.

3).Belum ada langkah(terobosan) nyata dari Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar terhadap peningkatan mutu pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan hanya merupakan tema dari setiap seminar atau pendidikan dan menjadi perdebatan dikalangan para praktisi pendidikan.Hal ini adalah akibat dari belum adanya langkah (terobosan) nyata dari Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat meningkatkan mutu pendidikan seharusnya bercermin dari penerapan konsep pendidikan di Indonesia yakni: a).konsep pendidikan sebagai Human Investment..b).konsep pendidikan yang berkeadilan.

Kedua konsep di atas akan dibahas berikut ini:

a).konsep pendidikan sebagai Human Investment.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Pembangunan sumber daya manusia daerah kabupten Kepulauan Selayar adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan. Pendidikan-investasi dalam modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan sehingga dikatakan harus melalui suatu spectrum yang luas dalam isi dan bentuk. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang baru membangun, mendidik lebih banyak penduduknya daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Ratio pendaftaran di semua tingkat telah meningkat hingga suatu keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara pengeluaran biaya oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar di sector pendidikan terus meningkat. Berbagai upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan mutu system pendidikan dan untuk meningkatkan relevansi pendidikan demi kebutuhan daerah.

Menurut Suryono (2008: 206) mengungkapkan investasi terhadap sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan pendidikan maupun pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi investasi sumber daya manusia tidak akan terlepas dari kendala biaya, karena dana yang ada terbatas. Dengan demikian dapat dikemukakan karakteristik dari investasi sumber daya manusia antara lain : a). Mengandung resiko biaya; b). Sifatnya jangka panjang sehingga manfaatnya baru dapat dirsakan dalam waktu yang lama; c).Resiko bahwa pendidikan yang ditempuh kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.

b).konsep pendidikan berkeadilan

Implementasi kebijakan pendidikan gratis merupakan konsep pendidikan berkeadilan, Anak kurang mampu dan anak tidak mampudigratiskan.Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

gratis ditujukan untuk anak kurang dan tidak mampu agar bisa terakses dalam pendidikan artinya jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah hanya karena anak kaya mendapat jatah yang sama dengan pelajar miskin.

Pendidikan adalah usaha sadar dari orang dewasa dalam mewujudkan situasi kegiatan belajar mengajar agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat,minat dan kompetensinya).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional BabI ketentuan umumpasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.dan Bab II dasar fungsi dan tujuan pasal 3 menjelaskan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Merujuk dari landasan yuridis tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru di sekolah agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya (bakat dan minatnya) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Untuk berkembangnya potensi peserta didik ,yang berpartisipasi bukan saja gurudi sekolah ,tetapi semua pihak pemerintah,masyarakat dan orangtua siswa.

Menurut Erdawati dalam Muhidin, 2008:1 mengatakan partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikutsertakan kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, ketrampilan, bahan atau jasa. Partisipasi dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan mereka sendiri

Ada dua bentuk partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yakni :1).pengambilan keputusan 2.Kerja nyata.

Pengambilan keputusan merupakan bentuk partsipasi masyarakat yang berkaitan dengan adanya persamaan pandangan masyarakat menyangkut keterlibatannya dalam melaksanakan penilaian dan keberhasilan sekolah.

Menurut Erdawati dalam Muhidin, 2008:11 mengatakan bahwa .bentuk partisipasi masyarakat antara lain: (a) kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, (b) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah, (c) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, (d) keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah, (e) keterlibatan masyarakat dalam mempertanggunggjawabkan keberhasilan sekolah

2).kerja nyata

Partisipasi masyarakat dalam bentuk kerja nyata artinya partisipasi bukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

hanya sekedar keputusan tetapi dalam bentuk kerja nyata.Masyarakat menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dalam bentuk dunia usaha.atau dunia industri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah baik yang berkaitan dengan sumber Daya Alam dan maupun yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusianya.

Menurut Korneli dalam Muhidin, 2008: 12 mengatakan bahwa .bentuk dukungan partisipasi masyarakat (dunia industri) terhadap sekolah diantaranya adalah: (a) memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang mutakhir, (b) penyelenggaraan magang/praktik kerja industri/praktik kerja lapangan siswa, (c) pelaksanaan uji kompetensi siswa/evaluasi belajar, (d) rekruitmen tenaga kerja.

Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat seperti di atas,tujuannya adalah agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat,minat,dan perkembangannya),atau mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Erdawati dalam Muhidin, 2008:1 mengatakan bahwatujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi: (a) memajukan kualitas belajar, (b) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, (c) meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, (d) memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, (e) mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

Menurut Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

di kabupaten Kepulauan Selayar Bab VI pasal 12 bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dalam bentuk sumbangan sukarela dan tidak mengikat.

Anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan Pemerintah Daerah kaupaten Kepulauan Selayar berbeda – beda setiap sekolah.(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancara dengan Andi Akhmad,S.Pd kepala SDN Parangia,Nasaruddin S.Pd bendahara anggaran pendidikan SMPN 2 Bontomatene,dan Firman,S.Ag kepala MA Benteng mengatakan bahwa anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan Pemerintah Daerah kaupaten Kepulauan Selayar berbeda – beda setiap sekolah.(wawancara,10 dan 10 September 2013)

Anggaran pendidikan gratis yang dialokasikan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar untuk biaya operasional sekolah untuk setiap satuan dan pendidikan berbeda –beda,karena dipengaruhi oleh factor :1).anggaran dibuat berdasarkan takiran dan asumsi yakni dihitung berdasarkanperhitungannya adalah hasil rincian pembiayaan berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan

2).Perhitungan biaya operasional sekolah yang meliputi: (a), data jumlah sekolah. (b), data jumlah siswa di setiap sekolah. (c), data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah,wakil kepala sekolah, wali kelas, guru, tenaga laboran, pustakawan, bendaharawan, kepala dan staf tata usaha, satpam, bujang sekolah) di setiap sekolah. (d). jumlah rombongan belajar. (e), ketersediaan jaringan listrik, telepon, dan air. 3) ,60 % dari total anggaran pendidikan gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

digunakan untuk insentif pendidik ,tenaga kependidikan dan remedial pembelajaran..

c.Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki tim pengembang Program Pendidikan Gratis (PPG) di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlihat dalam table 4.2 di bawah ini: :Tabel 4.2.Jumlah alat dan kondisi

No.	Nama alat	Jumlah (buah)	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				berat	Sedang	Ringan
1.	Laptop	4	4			
2.	Meja	5	5			
3	Kursi	8	8			
4.	Lemari	2	2			

(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa laptop 4 buah,meja 5 buah,kursi 8 buah, dan lemari 2 buah.Fasilitas yang dimiliki tim pengembang Program Pendidikan Gratis (PPG) di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :laptop 4 buah,meja 5 buah,kursi 8 buah, dan lemari 2 buah (wawancara.9 September 2013)

Fasilitas adalah barang atau benda yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan tugasnya

Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis fasilitas seperti laptop ,meja,kursi dan lemari sangat diperlukan karena ditinjau dari aspek manfaatnya. Adapun manfaat fasilitas adalah sebagai berikut :

a).Laptop

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Adapun manfaat laptop dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

:1).mempermudah penyelesaian tugas tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang berkaitan dengan data-data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis.

2).membantu tim pengendali Program Pendidikan Gratis menyelesaikan permasalahan jika terdapat data yang salah.

3)memudahkan tim pengendali Program Pendidikan Gratis mencari data penerima anggaran pendidikan gratis jika ada pihak yang membutuhkan

b).Meja

Adapun manfaat meja dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut:

1).untuk meletakkan laptop

2).sebagai tempat untuk menulis

3).untuk meletakkan barang-barang lain yang diperlukan

c).Kursi

Adapun manfaat kursi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

1).sebagai tempat duduk tim pengendali Program Pendidikan Gratis

2).sebagai tempat duduk tamu (kepala sekolah , bendahara ,komite sekolah atau pihak lain yang berkepentingan) dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis

d).Lemari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Adapun manfaat lemari dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

1).sebagai tempat menyimpan arsip data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis

2).sebagai tempat menyimpan arsip laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh kepala sekolah atau bendahara

3).sebagai tempat menyimpan arsip lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Edwards III (dalam Nawawi, 2007) mengemukakan dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari kekuatan-kekuatan seringnya birokrat mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tinggi, yaitu yang berkaitan sumber daya yaitu Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, jika para pelaksana memiliki sumber daya yang diperlukan ,tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak akan efektif. Sumber daya yang penting meliputi:

1) Staf (*staff*)

Staf yang memadai, dalam pengimplementasian kebijakan, staf merupakan salah satu faktor yang penting.Jumlah staf dan mutuatau keahlian-keahlian yang dimiliki staf harus memadai.

2) Anggaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Anggaran ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya menarik dana dari suatu program, membeli barang-barang dan jasa, dan lain sebagainya.
Fasilitas 3.Fasilitas (*facilities*)

Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3.Disposisi

Disposisi adalah perilaku atau watak dan karakteristik yang dimiliki tim pengembang Program Pendidikan Gratis

Perilaku tim pengembang Program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar antara lain ::komitmen, kejujuran, disiplin,bertanggungjawab ,lapang dada dan tempramen.(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara denganketerangan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa perilaku tim pengembang Program Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar antara lain ::komitmen, kejujuran, disiplin,bertanggungjawab ,lapang dada dan tempramen.(wawancara 9 September 2013).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Komitmen,kejujuran, disiplin,bertanggungjawab dan lapang dada merupakan perilaku yang sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis.

a).Komitmen

Komitmen adalah perilaku seseorang yang menggambarkan keterikatan untuk melakukan sesuatu.atau kontrak.Komitmen bukan saja dimilililiki oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis,namun untuk semua pihak ,khususnya kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran dan bendahara selaku pelaksana anggaran harus berkomitmen untuk mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni tepat sasaran dan mencapai tujuan.

Bentuk komitmen kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran pendidikan gratis adalah terlebih dahulu kepala sekolah menandatangani fakta integritas di atas materai Rp6000. .Fakta integritas adalah surat yang berisi pernyataan tentang kesanggupan kepala sekolah untuk mengelola dan menggunakan anggaran pendidikan gratis secara transparan dan akuntabel.

2).Kejujuran

Kejujuran adalah perilaku seseorang yang menggambarkan ketulusan hati.Kejujuran bukan saja dimilililiki oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis,namun untuk semua pihak ,khususnya kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran dan bendahara pelaksana anggaran harus memiliki ketulusan hati dalam mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni tepat sasaran dan mencapai tujuan.

3),Disiplin

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Disiplin adalah perilaku seseorang yang menggambarkan kepatuhan kepada peraturan.Disiplin bukan saja dimililiki oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis,namun untuk semua pihak ,khususnya kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran dan bendahara selaku pelaksana anggaran demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni tepat sasaran dan mencapai tujuan

4).Bertanggungjawab

Bertanggungjawabadalah perilaku seseorang yang menggambarkan selalu siap sedia menanggung resiko.Bertanggungjawab bukan saja dimililiki oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis,namun untuk semua pihak ,khususnya kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran dan bendahara selaku pelaksana anggaran demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni tepat sasaran dan mencapai tujuan harus selalu siap sedia menanggung resiko.baik dalam bentuk sanksi

Berdasarkan Perda no.3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar menjelaskan bahwa bagi kepala sekolah dan atau guru yang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun dapat diberi sanksi

: Pertama sanksi administrasi. Kedua, ketentuan penyidikan, Ketiga, ketentuan pidana

a).Sanksi administasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kepala Sekolah dan atau guru yang melakkan pungutan akan diberikan sanksi admimistarsi atas pelanggaran berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b).Ketentuan Penyidikan

Ketentuan penyidikan bagi Kepala Sekolah dan atau guru yang melakukan pungutan ,maka yang melakukan penyidikan adalah pejabat penyidik umum dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Adapun wewenang penyidik adalah sebagai berikut : Pertama, menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindaj pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. (b), meneliti, mencatat, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, (c). meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. (d). memeriksa buku – buku ,catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut, (e). melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan – bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti, (f). meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan, (g). menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan ata tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. (h). memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, (i).memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

tersangka atau saksi, (j). menghentikan penyiidikan, (k). melakukan tindakan lain yag perlu untuk kelancaran penyidikann tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggunjawabkan.

c).Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan pidana bagi Kepala Sekolah dan atau guru yang melakukan pungutan adalah sebagai beikut : Pertama, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau didenda paling banyak Rp 50.000.000,-. Kedua, tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

5).Lapang dada

Lapang dada adalah perilaku seseorang yang menggambarkan berasa senang.Lapang dada bukan saja dimililiki oleh tim pengendali Program Pendidikan Gratis,namun untuk semua pihak ,khususnya kepala sekolah selaku penanggungjawab anggaran dan bendahara selaku pelaksana anggaran demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan gratis yakni tepat sasaran dan mencapai tujuan.

6). Temperamen

Tempramen adalah perilaku seseorang yang menggambarkan mudah tersinggung dan mudah marah.Timbulnya sIkap temperamen dari tim pengendali Program Pendidikan Gratis karena dipengaruhi oleh factor : 1).penempatan 4).insentif

Kedua tersebut di atas,akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Penempatan pegawai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Penempatan pegawai merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang.Penempatan pegawai tim pengendali Program Pendidikan jika tidak sesuai, maka akan cenderung menolak. Karena dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu : a).tidak melalui analisis jabatan.b).pertamanan

Kedua factor tersebut di atas ,akan diuraikan lebih lanjut:

a).Tidak melalui analisis jabatan.

Analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan, penganalisisan,dan pensin

tesiasaninformasi mengenai jabatan.Penempatan tim pengendali Program Pendidikan Gratis tidak melalui seleksi analisis jabatan sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi tim pengendali Program Pendidikan Gratis sehingga cenderung menolak dan bersikap temperamen.

b).Mutasi

Mutasi adalah perpindahan tempat tugas.Mutasi pada dasarnya merupakan penempatan pegawai pada posisi yang strategis.Penempatan merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi tim pengendali Program Pendidikan Gratis. Penempatan tim pengendali Program Pendidikan Gratis.tidaksesuai dengan keinginannya, sehingga cenderung menolak dan bersikap temperamen,karena dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik. sepertitidak mendukung waktu pemilihan Kepala Daerah.Tidak mendukung waktu pemilihan kepala daerah karena dipengaruhi tiga faktor : a), tidak ada ikatan emosional. b), tidak ada hubungan kekerabatan,c), tidak tertarik kepada Visi dan Misi calon Kepala Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

.2).insentif

Insentif adalah tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diterima yang diterima oleh anggota tim pengendali Program Pendidikan Gratis jika dianggap kurang makaakan berpengaruh terhadap psikologinya dan cenderung bersikap temperamen karena insentif yang diterima dianggap tidak sebanding dengan tugas yang dikerjakannya.

Edwards III (dalam Nawawi, 2007) mengemukakan dua hal yang perlu diperhatikanditinjau dari dimensi disposisi yaitu :

1).Penempatan Pegawai (*staffing the bureaucracy*),

Penempatan Pegawaimenggambarkan sikap dari pelaksana kebijakan.Penempatan pegawai kadangkala menyebabkan masalah.Apabila penempatan pegawai itu sesuai dengan keinginannya,maka ia cenderung tidak menolak.Begitu juga sebaliknya,jika penempatan pegawai tidak sesuai dengan keinginannya ,maka ia cenderung menolak.

2).Insentif (*Incentives*),

Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diterima di luar gaji pokok.Banyak sedikit insentif yang diterima staf dapat mempengaruhi perubahanperilakunya.Mengubah perilaku staf merupakan pekerjaanyang sulit dan juga tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar.

4.Struktur birokrasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Skema struktur organisasi Staf Program Pendidikan Gratis pada Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlihat pada table 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3.Skema struktur organisasi staf Program Pendidikan Gratis

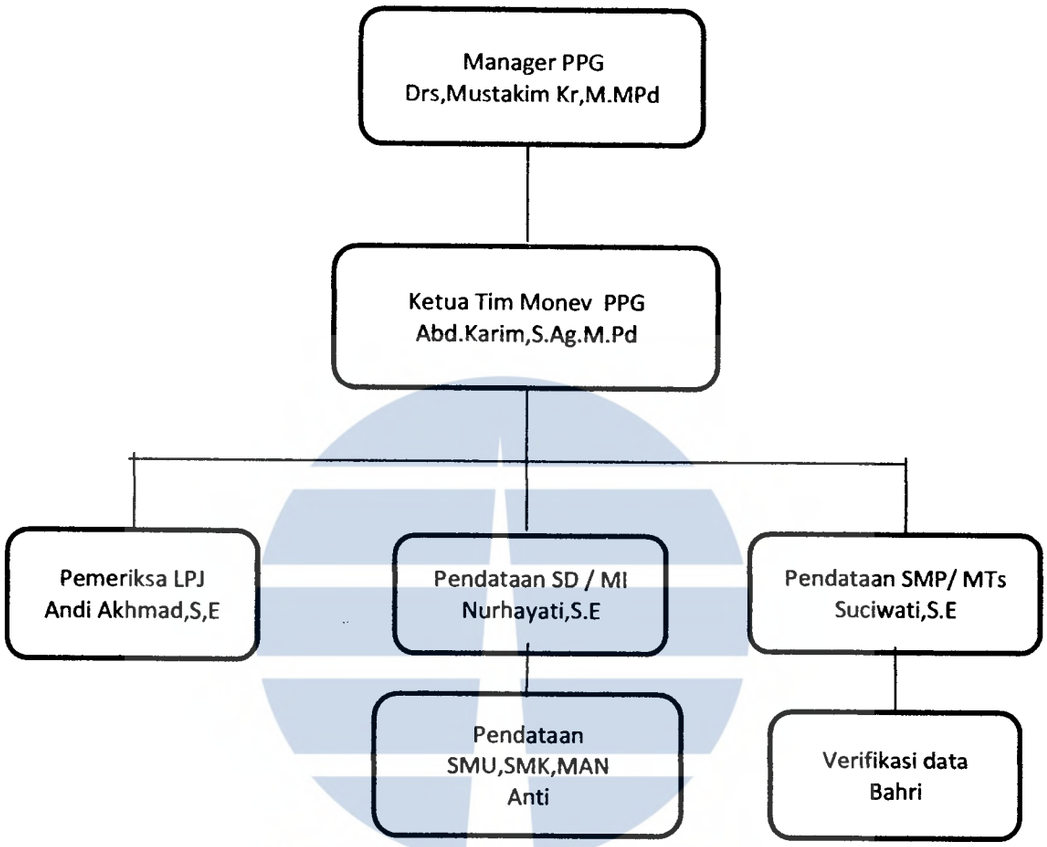

(data Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa struktur organisasi itu menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi staf dalam implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pendidikan gratis dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.(wawancara,9 September 2013).

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu pada tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.karena dalam struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan tugas atau pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa

Staf berdasarkan struktur organiisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah.: (1) Drs.Mustakim KR,M.MPd.(2).Abd.Karim,S.Ag.M.Pd.(3).Andi AKhmad,S.E,(4).Nurhayati,S.E (5).Suciwati,S.E.(6).Anti (7).Bahri(data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa staf berdasarkan struktur organiisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah.: (1) Drs.Mustakim KR,M.MPd.(2).Abd.Karim,S.Ag.M.Pd.(3).Andi AKhmad,S.E,(4).Nurhayati,S.E (5).Suciwati,S.E.(6).Anti (7).Bahri(wawancara,9 September 2013)

(1).Drs.Mustakim KR,M.MPd.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Dipilihnya Drs.Mustakim KR.,M.MPd dipilih sebagai manajer Program Pendidikan Gratis dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh factor 1).jabatan. 2).kompetensi

Berdasarkan gambaran umum Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar Drs.Mustakim KR.,M.MPd menjabat sebagai sekretariis Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar. Sekteratis adalah unsur pelayanan tekhnis administratif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

2).Kompetensi

a).Drs.Mustakim KR,M.MPd berijazah S2

b).telah mengikuti pendidikan dan latihan manajer Program Pendidikan Gratis

2).Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd.

Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd.dipilih sebagai ketua tim pengendali Program Pendidikan Gratis karena ditinjau dari factor : (a).jabatan . b).kompetensi

(a).Jabatan

Berdasarkan gambaran umum Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd. adalah sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan.

(b).kompetensi

1).Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd berijazah S2

2).mampu merumuskan program perencanaan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3).Mampu memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program rutin dalam pembangunan.

4).telah mengikuti pendidikan dan latihan

Adapun tugas Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

1).merumuskan program perencanaan implementasi kebijakan pendidikan gratis

2).merumuskan program pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan gratis

3).merumuskan program monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis

2).Andi Akhmad,S.E.

Andi Akhmad,S.E dipilih sebagai anggota pemeriksa Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis dalam tim Program Pendidikan Gratis karena dipengaruhi oleh factor kompetensi yakni berijazah S1 jurusan ekonomi.2).telah mengikuti pendidikan dan latihan tentang Laporan Pertanggungjawaban keuangan..

3).Nurhayati,S.E, dan Suciwati,S.E,

Nurhayati,S.E dan Suciwati ,S.E dipilih sebagai tim Monev Program Pendidikan Gratis karena dipengaruhi oleh factor : a).kompetensi b).skill

a),kompetensi

1).berijazah S1

2).telah mengikuti pendidikan dan latihan

b).Skill

1).mampu membuat aplikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

4,Anti dan Bahri

Anti dan Bahri dipilih sebagai anggota tim pengendali Program Pendidikan Gratis karena dipengaruhi oleh factor skill yakni mampu membuat aplikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis

Dalam Struktur organisasi sudah terjadi pemisahan tugas operasional masing-masing staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Adapun tugas operasional staf dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

1.Drs.Mustakim KR,M.MPd

Adapun tugas operasional Drs.Mustakim KR,M.MPd sebagai manajer Program Pendidikan Gratis dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

a).melakukan rapat pembentukan tim pengendali Program Pendidikan Gratis

b).menandatangani rekomendasi penarikan tunai anggaran pendidikan gratis

c).melaporkan hasil verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.

d).menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis

2.Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd

Adapun tugas operasional Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

a).merumuskan program perencanaan implementasi kebijakan pendidikan gratis

b).merumuskan program pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan gratis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

c).merumuskan program monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis

3.Andi Akhmad,S.E

Tugas operasional dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai memeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh kepala sekolah SD / MI atau sederajat sampai SMU,SMK,MAN atau sederajat baik negeri maupun swasta

4.Nurhayati,S.E

Adapun tugas operasional dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

a).melakukan pendataan sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SD / MI atau sederajat baik negeri maupun swasta

b).melakukan verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SD / MI atau sederajat baik negeri maupun swasta

c).melaporkan hasil verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SD / MI atau sederajat baik negeri maupun swasta kepada ketua tim pengembang Program Pendidikan Gratis untuk diteruskan ke manager Program Pendidikan Gratis

d).menyalurkan anggaran pendidikan gratis ke rekening sekolah penerima untuk tingkat SD/MI atau sederajat negeri maupun swasta

5.Suciwati,S.E

Adapun tugas operasional dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

a).melakukan pendataan sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMP / MTs atau sederajat baik negeri maupun swasta

b).melakukan verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMP / MTs atau sederajat baik negeri maupun swasta

c).melaporkan hasil verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMP / MTs atau sederajat baik negeri maupun swasta kepada ketua tim pengembang Program Pendidikan Gratis untuk diteruskan ke manager Program Pendidikan Gratis

d).menyalurkan anggaran pendidikan gratis ke rekening sekolah penerima untuk tingkat SMP / MTs atau sederajat negeri maupun swasta

6.Anti

Adapun tugas operasional dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

a).melakukan pendataan sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMU,SMK,MAN atau sederajat baik negeri maupun swasta

b).melakukan verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMU,SMK,MAN atau sederajat baik negeri maupun swasta

c).melaporkan hasil verifikasi data sekolah penerima anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMU,SMK,MAN atau sederajat baik negeri maupun swasta kepada ketua tim pengembang Program Pendidikan Gratis untuk diteruskan ke manager Program Pendidikan Gratis

d).menyalurkan anggaran pendidikan gratis ke rekening sekolah penerima untuk tingkat SMU,SMK,MAN atau sederajat negeri maupun swasta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

7.Bahri

Adapun tugas operasional dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :

a).membuat dan mengirim surat kepada kepala sekolah di semua satuan dan jenjang pendidikan yang berisi tentang waktu penyetoran profil sekolah ke tim pengendali Program Pendidikan Gratis.

b).membuat fakta integritas untuk ditandatagani oleh kepala sekolah di semua satuan dan jenjang pendidikan penerima anggaran pendidikan gratis.

c).membuat rekomendasi penarikan tunai yang ditandatangani oleh manajer Program Pendidikan Gratis.

Struktur organisasi itu bermanfaat bagi tim pengembang Program Pendidikan Gratis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa struktur organisasi itu bermanfaat bagi tim pengembang Program Pendidikan Gratis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Manfaat struktur organisasi bagi tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai pedoman dan acuan tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.Artinyastruktur organisasi merupakan: (a). aturan dan prosedur formal, artinya adanya pengaturan fungsi – fungsi resmi yang saling terkait oleh aturan yang menjadikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

fungsi – fungsi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengaturan dan prosedur operasional yang baku menyebabkan tugas pokok dan fungsi tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan secara rutin dan pasti.. (b). spesialisasi pekerjaan ,.artinya adanya pembagian kerja yang jelas pada tim pengendali Program Pendidikan Gartis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar , sehingga setiap anggota tim pengembang mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang yang seimbang dengan tugas yang harus dijalankannya . (c). kejelasan hierarki, artinya adanya pemabgian tugas dan fungsi yang mengikuti perinsip hierarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah di awasi oleh tingkatan yang lebih tinggi , sehingga tersusun suatu hierarki otoritas yang runtut mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah.Susunan hierarki otoritas ini disebut juga disebut dengan rangkaian perintah (e). inpersonaliti, artinya adanya pemisahan antara kepemilikian fasilitas maupun administrasi dari ketuatim pengendali Program Pendidikan Gratis dan pemisahan ini akan membuat tim pengendali Program Pendidikan Gratis tetap bersifat inpersonal, yang dianggap penting untuk menciptakan efesiensi. (f). adanya obyektifitas, artinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dalam tim pengembang Program Pendidikan Gratis. Pemegang suatu tugas haruslah melakukan kegiatan secara objektif sesuai dengan tugas yang harus dikerjakannya,dan tidak menggunakan fungsinya untuk melayani kepentingan. dirinya pribadi. (g). kegiatan administrative, artinya keputusan – keputusan dan peraturan – peraturan dalam tim pengendali Program Pendidikan Gratis selalu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dituangkan dalam bentuk tertulis..

Tim pengendali Program Pendidikan Gratis sudah merasa senang dengan adanya struktur organisasi (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013).

Hasil wawancara dengan Abd.Karim,S.Ag.,M.Pd kepala sub bagian hukum dan perencanaan Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar mengatakan bahwa tim pengendali Program Pendidikan Gratis merasa senang dengan adanya struktur organisasi(wawancara ,9 Septemebr 2013).

Tim pengendali Program Pendidikan Gratis sudah merasa senang dengan adanya struktur organisasi karena dipengaruhi oleh factor:1). adanya spesialisasi kegiatan kerja.2).adanya standarisasi kegiatan kerja.3).adanya koordinasi kegiatan kerja.

a).Adanya spesialisasi Kerja

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu tim pengendali Program Pendidikan Gratis dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.tim pengendali Program Pendidikan Gratis sudah memperoleh tugas dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya

b).Adanya standardisasi kegiatan kerja

Struktur Organisasi tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar merupakan standarisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mensukseskan Program Pendidikan Gratis.Dalam melaksanakan tugas pokok dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

fungsinya tim pengendali Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar harus mengacu kepada standar operasional (SOP) yang ada.

c).Adanya koordinasi kegiatan kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ,di mana tim pengendali Program Pendidikan Gratis karena bukan selamanya berada di tempat yang vakum,akan tetapi akan selalu berhadapan dengan kepala sekolah,bendahara,pengurus komite sekolah,orangtua siswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis yang beragam karakter,sudah tidak dapat dipungkiri lagi pasti ada hambatan atau halangan,seperti adanya laporan atau aduan masyarakat atau orangtua siswa tentang kepala sekolah dan atau guru yang masih melakukan pungutanatau ada anggota tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang berhalangan berat,dimutasi,dan lain-lain maka diperlukan adanya koordinasi antara manajer Program Pendidikan Gratis dengan tim pengendali Program Pendidikan Gratis dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan masalah tersebut. 144

Birokrasi yang terjadi dalam proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyulitkan dan memudahkan (data dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar,4 September 2013)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil wawancara dengan Andi Akhmad,S.Pd.SD kepala SDN Parangia ,Daeng Siola SMPN 2 Bontomatene,dan Firman kepala MA Benteng mengatakan bahwa birokrasi yang terjadi dalam proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh tim pengembang Program Pendidikan Gratis di Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyulitkan dan memudahkan.(wawncara ,10 September 2013)

Birokrasi merupakan pejabat yang duduk di belakang meja.yang melakukan pertunjukan kekuasaan.(kewenangan) melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian ,adanya prosedur yang dukung oleh peraturan perundang-undangan ,maka birokrasi menjamin terjadinya pengulangan-pengulangan yang dapat menciptakan kelancaran atau kemudahan.Namun dalam pelaksanaannya dapat menciptakan kelambanan-kelambanan yang dapat menyulitkan atau menyusahkan.Bahkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan ,disebutkan bahwa birokrasi dalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban ,serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya.

Terlepas dari itu semua,perlu kita sadari bahwa birokrasi mempunyai kekuatan besar yang tidak mungkin kita hindari baik birokrasi dari lingkungan pemerintah maupun dari lingkungan swasta.Semua orang utamanya kepala sekolah atau bendahara pendidikan gratis,suka atau tidak suka ,senang atau tidak senang,dalam hidup akan selalu berhadapan dengan birokrasi.Mulai dari hidup sampai mati kita selalu akan memiliki urusan dengan birokrasi.karena birokrasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis merupakan aparat bergaji yang melaksanakan tugas pemerintah,memberikan nasehat dan teguran, serta melaksanakankeputusan kebijakan yang terkait dengan pendidikan gratis.

Birokrasi pada tim pengendali Program Pendidikan Gratis , dalam memeriksa doukmen Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis memudahkankepala sekolah atau bendahara karena dipengaruhi oleh factor 3 faktor yaitu.1.aturan-aturan dan prosedur resmi 2).kejelasan hierarki.3).adanya objektivitas.

Ketiga factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Aturan-aturan dan prosedur resmi

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis berisi sejumlah data.Data-data tersebut yang berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Data-data tersebut merupakan pengaturan fungsi-fungsi yang saling terikat oleh aturan yang membuat fungsi-fungsi resmi menjadi satu kesatuan yang utuh.

2.Kejelasan hierarki

DokumenDokumen Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis berisi sejumlah data yang berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Data-data tersebut menggambarkan pengorganisasian yang mengikuti hierarki mulai dari tingkatan paling tinggi sampai paling rendah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

Menurut Peraturan Bupati no.222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis dilampirkan dokumen laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis yang meliputi:

(a).surat pengantar dari kepala sekolah penerima anggaran.

(b).Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penetapan alokasi anggaran pendidikan gratis tahun berjalan.

(c).Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun berjalan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

(d).,Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

(e).data pemanfaatan anggaranseperti : buku kas umum,buku kas pembantu,buku pembantu bank,buku pembantu pajak,daftar penerimaan insentif tenaga kependidikan beserta kuitansinya,daftar penerimaan innsentif jam mengajar guru beserta kuitansinya,daftar penerimaan insetif remedi berserta kuitannya, bukti penarikan dan penyetoran pajak dan divalidasi oleh pegawai pajak,danbukti pembelian barang – barang habis pakai (nota pesanan,berita acara serah terima barang,faktur penjualan,dan kuitansi),

(f).foto copy rekening sekolah,

(g).daftar hadir bulanan guru dan pegawai,

(h).Surat Keputusan pembagian tugas guru,daftar hadir jam mengajar guru,

(i).Surat Keputusan pelaksanaan remedial,

(j).daftar hadir pelaksanaan remedial,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(k).daftar hadir peserta remedial,

(l).Surat pernyataan kepala sekolah terkait sering tersendatnya pencairan anggaran pendidikan gratis.

3).Adanya obyektivitas

DokumenDokumen Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis berisi sejumlah data yang berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Data-data ini menggambarkan adanya objektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Objektivas dalam artian bahwa anggaran pendidikan gratis dikelola oleh kepala sekolah secara transparan dan akuntabilitas.

Birokrasi pada tim pengendali Program Pendidikan Gratis , dalam memeriksa Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis menyulitkan kepala sekolah atau bendahara karena dipengaruhi oleh dua factor yaitu: 1).Ketidakjelasan informasi). 2).Ketidakkonsistenan informasi

Kedua factor tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1).Ketidakjelasan informasi

Tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis tentu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).Guna untuk mengetahui secara pasti mana dokumen yang sudah memenuhi standard dan mana doukmen yang belum memenuhi stndar dan harus diperbaiki.SOP pemeriksaan LPJ pemanfaatan anggaran pendidikan gartis merupakan aturan, regulasi, atau kebijakan terkait dengan pemanfaatan anggaran pendidikan gratis sebagaimana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Tim pengendali Program Pendidikan Gratisyang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban adalah pejabat bergaji (biorkrasi) dari dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar.Dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan.sudah pasti,terjadi pertunjukan kekuasaan (kewenangan) yang berlangsung melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati nomor 222 tahun 2013 tentang pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.Prosedur menuntut adanya pengulangan-pengulangan.Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tercipta kelambanan-kelambanan.Kelambanan itu terjadi karena menuruti tata aturan yang banyak liku-likunya.Hal ini terjadi karena ketidakjelasan informasitentang keabsahan dokumen laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.sehingga kepala sekolah atau bendahara di semua satuan dan jenjang pendidikan merasa kesulitan pada saat laporan pemanfaatan anggaran pendidikan gratisnya sedang diperiksa oleh tim pengendali Program Pendidikan Gratis..

Keidakjelasan informasi keabsahan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis oleh tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh dua factor yaitu :

1).ketidakmampuannya untuk memilih mana kepentingan pribadi/golongan dan kepentingan public (umum).2).ketidakluwesan untuk beradaptasi dengan perubahan lingungan yang sedang berlangsung cepat dan kontinu.

Kedua factor tersebut di atas,akan diuraikan lebih lajut di bawah ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

(1).Ketidakmampuannya untuk memilih mana kepentingan pribadi/golongan dan kepentingan public (umum)

Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya kepentingan,Kepentingan itu dapat berwujud kepentinganpribadi/golongan dan kepentingan public (umum).Pemisahan pemenuhan antara kepentingan kepentingan pribadi/golongan dan kepentingan public (umum) merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh semua orang,khususnya tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis.

SOP pemanfaatan anggaran pendidikan gratis sangat jelas,transparan dan sudah diketahui oleh kepala sekolah atau bendahara.namun karena ketidakmampuan untuk memilih mana kepentingan pribadi/golongan dan kepentingan public (umum) bagi tim pengendali Program Pendidikan Gratis ,maka secara terpaksa kelambanan tetap terjadi.Pemeriksa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan tidak hanya hidup untuk memenuhi kepentingan umum semata,tetapi kepentingan pribadi/ golongan / kelompok perlu juga diakomodasikan.

(2).Ketidakluwesannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sedang berlangsung cepat dan kontinu.

Lingkungan mempunyai banyak arti dalam kehidupan sehari-hari.Ada yang mengartikan lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya,.ada mengartikan lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja pemerintahan lurah.dan ada yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

mengartikan lingkunganadalah golongan atau kalangan.Dari pengerian tersebut kita kenal lingkungan alam,lingkungan hayati,lingkungan non hayati,lingkungan kebudayaan dan lingkungan social.Dari kelima lingkungan tersebut yang berubah cepat dan kontinu adalah lingkungan social,karena di dalam lingkungan tersebut terjadi interaksi antara berbagai elemen masyarakat melalui berbagai system peradaban (norma) yang dapat mempengaruhi tingkah laku.Dengan berubahnya lingkungan secara cepat dan kontinu

maka,diharapkan para birokrasi baik dilingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta supayaluwes beradaptasi dan bersikap antipasti dalam meningkatkan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.Jika tidak ,dapat menimbulkan masalah berupa tindakan-tindakan yang menyulitkan bagi masyarakat.Lingkungan berubah cepat dan kontinu adalah merupakan akibat dari tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.Bentuk Pelayanan yang diharapkan masyarakat dari para biorkrasi adalah pelayanan yang sederhana,ada kejelasan , kepastian,kenyamanan,keterbukaan,efisiensi dan efektivitasnya ,bukan kelambanan.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis,pada waktukepala sekolah atau bendahara menyetor laporan pertanggungjawaban pemanfaatan pendidikan gratis,kepada tim pengendali Program Pendidikan Gratis.untuk diperiksa,pelayanan yang diperoleh adalah pelayanan yang menuruti tata aturan yang banyak liku-likunya,bukan pelayanan yang sederhana,ada kejelasan , kepastian,kenyamanan,keterbukaan,efisiensi dan efektivitasanya.Fakta ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menggambarkan ketidakluwesannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan birokrasi yang sedang berlangsung cepat dan kontinu.

2).Ketidakkonsistenan informasi

Informasi yang diterima oleh kepala sekolah terkait keabsahan isi dokumen laporan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis,selalu berubah-ubah.Setiap pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kepala sekolah ataubendahara selalu bingung dan merasa kesulitan.

. Menurut Edwards III (dalam Nawawi, 2007) mengemukakan dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari kekuatan-kekuatan seringnya birokrat mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tinggi, yang berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu:

1) SOP (*Standard Operating Procedure*)

Adanya suatu SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah aturan atau regulasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang komplek dan luas, dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik, serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.Begitu juga sebaliknya,

2).Fragmentasi (*fragmentation*)

Fragmentasi adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

unit birokrasi.Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab inidiuraikan simpulan dan saran dari temuan dan pembahasan, Kedua aspek tersebut akan dibahas di bawah ini :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan ,maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar kurang optimal jika ditinjau dari dimensi :

1.komunikasi

Unsur-unsur yang berpengaruh ditinjau dari dimensi komunikasi adalah transmisi berjalan kurang optimal, ketidakjelasan dan ketidak konsistenan informasi.

a).Transmisi Implementasi kebijakan pendidikan gratis yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar berjalan kurang optimal karena dipengaruhi oleh dua factor : 1). Tidak ada AC..2). listrik sering padam

b).Ketidak jelasan informasi dalam sosialisasi karena dipengaruhi oleh dua factor 1).pemateri terlalu cepat dalam memaparkan materinya, 2).pemateri terlalu serius dalam memaparkan materinya.

c).Ketidak konsistenan informasi dalam sosialisasi karena dipengaruhi oleh empat factor : 1).pemateri tidak selamanya berada pada tempat yang vakum. 2).pemateri selalu berhadapan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.3),situasi politik

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43952

yang sementara memanas.4)..pemateri hanya manusia biasa. Tidak luput dari kekhilafatan.

2. sumberdaya,

Aspek yang berpengaruh ditinjau dari dimensi sumber daya adalah anggaran . Anggaran pendidikan gratis belum optimal meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Kepulauan Selayar karena dipengaruhi oleh factor :

1.hanya dapat membiayai tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses,standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan. 2).kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan belum menyentuh peningkatan mutu pendidikan seutuhnya.3).Belum ada langkah (terobosan) nyata dari Pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan sehingga hanya sekedar menjadi materi seminar pendidikan dan perdebatan dikalangan para praktisi pendidikan 3.disposisi

Unsur yang berpengaruh ditinjau dari dimensi disposisi adalah perilaku temperamen dari tim pengendali Program Pendidikan Gratis karena dipengaruhi oleh factor :1).penempatan tim pengendali Program Pendidikan Gratis tidak melalui analisis jabatan dan mutasi 2).insentif yang diterima kurang.

4.Struktur birokrasi

Unsur yang berpengaruh ditinjau dari dimensi struktur birokrasi adalah kepala sekolah atau bendahara sering merasa kesulitan dalam pemeriksaan LPJ pemanfaatan anggaran pendidikan gratis karena dipengaruhi oleh dua factor :

1).Ketidak jelasan informasi

2) Ketidak konsistenan informasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran penulis sebagai berikut:

1.Menghimbau Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar supaya Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam melaksanakan sosialisasi harus memperhatikan tiga unsure komunikasi yakni transmisi,kejelasan informasi dan konsistensi informasi..

2.Menghimbau Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar melalui dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar (1).menambah anggaran pendidikan gratis ,(2).kebijakan dalam bidang pendidikan harus berpihak kepada peningkatan mutu pendidikan.3).harus ada terobosan nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan

3.Menghimbau Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar bahwa penempatan tim pengendali Program Pendidikan Gratis harus dilaksanakan melalui analisasi jabatan dan dimutasi bukan karena politik serta menambah insentif yang diterma oleh tim pengendali Program Pendidikan Gratis.

4.Menghimbau Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Selayar, tim pengendali Program Pendidikan Gratis yang bertugas sebagai pemeriksa laporan pertanggung jawaban pemanfaatan anggaran pendidikan gratis, dalam menggunakan SOP perlu memiliki kejelasan dan konsisten informasi terhadap keabsahan dokumen laporan pertanggungjawaban.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia

…….. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

…….. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

…….. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar

Peraturan Pemerintah Daerah propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di propinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar.

Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 222 / III /2013 tentang penetapan alokasi anggaran dana pendidikan gratis di kabupaten Kepulauan Selayar Abdurahman M dan Muhidin S A. 2007. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam

Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto,S,2001 Prosedur Penelitian.Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi V) Jakarta :PT.Rineke Cipta

Madjid, Nurcholish. 2003. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Ali, Moh, 2001, Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi. Bandung:Angkasa.

--------(2000), "Sistem Penjaminan Mutu Dalam Manajemen Mutu Pendidikan",dalam Mimbar Pendidikan,No.l Tahun XIX 2000.

Moleong, Lexy J, 2005 Metode Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

.

Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Sumadi Suryabrata. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.

Nasution, 1995, Didaktik Asas-Asas Mengajar,Jakarta: Bina Aksara

Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fadillah. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.

Nawawi, Hadari. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.: PT.Toko Gunung Agung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka